

AKTUALISASI KERUKUNAN HIDUP
ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA
BUKITTINGGI

Oleh:
Dr. Novi Hendri, M. Ag

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Penulis :

Dr. Novi Hendri, M.Ag

Tata Letak & Desain Cover:

Firdaus Annas, S.Pd. M.Kom

Cetakan Pertama, September 2018

xx + 127 hlm. 15,5 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

IAIN BUKITTINGGI

Kampus II : Jl. Gurun Aur Kubang Putih

Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Indonesia

Telp : (0752) 22875 | Fax : (0752) 33163

Website : <http://iainbukittinggi.ac.id>

ISBN : 978-602-6377-37-1

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penulis dan penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sembahkan kepada Allah Swt atas rahmat dan karuniaNya sehingga penelitian **“Akualisasi Kerukunan dan Konflik Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi”** dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Bukittinggi, yang telah memberikan bantuan dana demi terlaksananya penelitian ini. Terima kasih banyak juga penulis sampaikan kepada Rektor IAIN Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam melakukan penelitian ini.

Selanjutnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan maaf dan terima kasih kepada mereka.

Penelitian ini melibatkan Pemerintah, Tokoh agama, Tokoh masyarakat serta masyarakat Kota Bukittinggi. Dan kepada beberapa informan yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah memberikan informasi yang objektif terhadap permasalahan penelitian ini. Semoga Allah Swt membalas kebaikan mereka semua.

Untuk kesempurnaan dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya kritikan konstruktif dan saran dari pembaca.

Bukittinggi, September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KAJIAN TEORITIS	6
A. Kajian Konseptual	6
1. Masyarakat Majemuk	6
2. Konflik Sosial : Pengertian, Faktor dan Penyebab	8
a. Pengertian.....	8
b. Faktor Pendorong Terjadinya Konflik	12
3. Kerukunan.....	15
a. Pengertian.....	15
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kerukunan	17
4. Aspek Sosial Budaya	21
B. Penelitian Yang Relevan.....	23
C. Kerangka Berfikir.....	30
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	30
A. Monografi Bukittinggi.....	30
1. Letak Geografi.....	30
2. Ekonomi.....	35
3. Pendidikan.....	39
4. Pemerintahan.....	42
B. Peta Kehidupan Keagamaan	46
1. Jumlah Penduduk.....	46
2. Badan/Organisasi Keagamaan.....	51
BAB IV POLA KERUKUNAN DAN KETIDAK RUKUNAN MASYARAKAT BUKITTINGGI	53
A. Deskripsi Pola Kerukunan dan Ketidakrukunan Masyarakat Bukittinggi	53
1. Potensi Konflik Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi	53

a.	Pemahaman Keagamaan yang Sempit.....	55
b.	Terbaikannya Sejumlah Norma Agama dan Penggunaan Simbol Agama sebagai Kepentingan politik dan ekonomi.....	58
c.	Pendirian Rumah Ibadah.....	63
2.	Potensi Kerukunan Antar Umat Beragama.....	67
a.	Ajaran Agama yang Luhur.....	69
b.	Budaya Pluralis.....	78
c.	Nasionalisme	83
B.	Transformasi Sosial	86
1.	Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Bukittinggi	86
2.	Perhatian Pemerintah.....	95
3.	Pendidikan Berbasis Aqidah	97
4.	Interaksi Antar Etnis.....	101
C.	Pandangan Dasar Strategis Pembinaan Kerukunan.....	105

BAB V PENUTUP109

DAFTAR PUSTAKA113



AKTUALISASI KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA di KOTA BUKITTINGGI

Dr. Novi Hendri, M.Ag

BAB I

PENDAHULUAN

Penggunaan agama sebagai sistem acuan nilai bagi sikap dan tindakan, dapat mengarah kepada penguatan integrasi masyarakat, namun konflik (atau bahkan disintegrasi) bisa juga terjadi ketika kelompok tertentu pada masyarakat tersebut mengembangkan paham atau aliran keagamaan baru yang cenderung mengembangkan sistem acuan nilai tersendiri.

Dalam situasi inilah biasanya muncul ketidak-rukunan di kalangan pemeluk suatu agama. Pada masyarakat yang heterogen dari segi agama, penggunaan agama sebagai acuan nilai dapat mengarah kepada konflik dan disintegrasi sosial, kecuali apabila masing-masing umat beragama dapat mengembangkan penafsiran keagamaan yang mempertemukan kesamaan-kesamaan yang terdapat pada masing-masing sistem acuan.

Problema utama masyarakat yang menggunakan agama sebagai sistem acuan nilai yang relatif dominan seperti di Indonesia, terletak pada kemampuan masyarakat tersebut menemukan mekanisme sosial tertentu, baik secara alamiah maupun terencana, yang dapat menjamin tertib hukum dan sosial. Secara alamiah dikembangkan sendiri oleh umat

beragama terhadap kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat, secara terencana adalah prakarsa yang dilakukan pemerintah untuk membentuk berbagai wadah untuk berkomunikasi, baik antar umat beragama maupun antar pemuka-pemuka agama dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama.

Bukittinggi merupakan kota yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat, menurut data tahun 2002 Bukittinggi mempunyai jumlah penduduk 92.768 orang, yang terbagi ke dalam berbagai macam pemeluk agama yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jumlah Penduduk	Kecamatan			
		Guguk Panjang	MKS	ABTB	Jumlah
1	Islam	36.811	33.398	19.898	90.107
2	Katolik	682	457	140	1.279
3	Protestan	419	489	228	1.136
4	Hindu	9	3	-	12
5	Buddha	183	25	4	212
6	Lainnya	4	11	7	22
	Jumlah	38.108	34.383	20.227	92.768

Sumber Data: Bukittinggi Dalam Angka 2002

Sehubungan dengan organisasi keagamaan di Kota Bukittinggi, terdapat beberapa organisasi keagamaan di antaranya: MUI, Muhammadiyah, Aisiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ta'lim, IPHI, PHBI,

GUPPI, LPTQ, NU, Tarbiyah dan BKPRM. Organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan kerukunan interen umat Islam. Melalui media ini umat Islam khususnya secara mudah dapat menampung aspirasi dan mengembangkan corak keberagaman masing-masing individu.

Kemajemukan atau pluralitas dalam skala tertentu dapat dipandang sebagai aset kekayaan bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi timbulnya persaingan secara sehat. Namun dalam keadaan yang berbeda, pluralitas tidak hanya dipandang sebagai perbedaan belaka, tetapi juga sebagai pertentangan atau konflik. Tantangan yang dihadapi masyarakat adalah bukan menghilangkan perbedaan dan pertentangan, melainkan bagaimana mengelola secara kreatif sehingga terwujud dalam *cooperation* dan *competition* (Effendi, Djohan, 1999:11). Heterogenitas dan kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat Bukittinggi tersebut menjadikan masyarakat Bukittinggi seperti terbagi atas sekat-sekat dengan batas-batas sosial yang jelas. Tetapi kondisi ini pada beberapa tahun belakangan menurut beberapa tokoh masyarakat ataupun tokoh agama di Bukittinggi tidak pernah menimbulkan konflik-konflik sosial antara kelompok yang berbeda tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya kecurigaan yang berpotensi terhadap munculnya konflik.

Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang pernah mencuat ke permukaan yang terjadi di Bukittinggi, beberapa kasus

tersebut antara lain Al-Qur'an berlapis Injil yang beredar di daerah Kamang, kasus ini sempat meresahkan masyarakat, tidak hanya umat Islam tetapi umat Kristiani juga merasa dilecehkan karena kitab suci mereka dijadikan sebagai bahan lapisan al-Qur'an. Kasus lain yang berkembang adalah keinginan dari beberapa pengurus agama lain untuk mendirikan rumah ibadah, yang akhirnya terkendala karena beberapa hal, seperti kesulitan dalam mendapatkan izin mulai dari tingkat RT sampai ke kabupaten/kota yang telah diatur dalam SKB 2 Menteri No I/1969.

Tetapi secara keseluruhan dari pengamatan di lapangan, peneliti melihat bahwa di Kota Bukittinggi masih terdapat pola-pola kerukunan yang tercipta sebagai hasil responsi sosial atas kebutuhan mereka sendiri (interen pemeluk agama) serta untuk berintegrasi dengan penganut-penganut agama yang berbeda. Salah satu bentuk mekanisme sosial yang diusahakan adalah dibentuknya forum komunikasi agama-agama, mengembangkan forum kesepahaman di antara para pemimpin dan tokoh agama melalui berbagai pertemuan serta mengembangkan perangkat peraturan yang berfungsi mencegah konflik. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik yang luas pada masyarakat Bukittinggi ketika sekat-sekat yang ada dalam masyarakat tidak dapat dipertahankan.

Untuk itu penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan, serta mayoritas

dan minoritas golongan agama tersebut terdapat dalam masyarakat Bukittinggi, bagaimana potensi-potensi konflik dan potensi-potensi kerukunan dapat muncul selanjutnya penelitian ini juga mencoba untuk menggali lebih dalam forum komunikasi antar umat beragama yang mencoba mewadahi lembaga-lembaga agama yang ada sehingga mampu meminimalisir potensi konflik yang berkembang pada masyarakat Bukittinggi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Konseptual

1. Masyarakat Majemuk

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dan kompleks, terbentang dari timur ke barat seluas 9400 mil dan terdiri dari lebih kurang 17.508 pulau yang didiami oleh 300 kelompok etnik dengan bahasa yang berbeda, serta jumlah penduduk sekitar 120 juta jiwa. Masyarakat Indonesia ditandai oleh dua karakteristik yang unik. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan; kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Piere L. Van den Bergh (**dalam Nasikum, 1995: 33**) menjelaskan beberapa karakteristik suatu masyarakat majemuk yakni; (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain, (2) memiliki struktur yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer, (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya

terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar, (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik diantara mengalami di antara kelompok-kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan (*coercion*) dan ketergantungan dalam bidang ekonomi, serta (6) adanya dominasi politik oleh satu kelompok atas kelompok yang lain.

Menurut Fedyani, (1986: IX) kemajemukan berarti terdapat keanekaragaman unsur penyusun masyarakat kita, yakni suku bangsa, agama, dan golongan-golongan sosial lainnya. Ciri yang nyata adalah kecenderungan yang kuat memegang identitas golongan sosial masing-masing. Orientasi yang kuat ke dalam golongan sendiri memberikan isyarat mengenai pekanya hubungan antar-golongan sosial dalam masyarakat kita. Orientasi kuat ke dalam tersebut merupakan faktor yang memperkuat batas sosial dan perbedaan. Agar tercipta integrasi, demikian Fedyani mengutip Frederik Barth, haruslah tercipta sejumlah pranata yang mengikat semua anggota golongan sosial sehingga setiap warga dapat mengidentifikasi dirinya pada satu ciri yang juga dimiliki oleh warga golongan sosial lainnya.

Kemajemukan atau pluralitas dalam skala tertentu dapat dipandang sebagai aset kekayaan bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi timbulnya persaingan secara sehat. Namun dalam keadaan yang berbeda, pluralitas tidak hanya dipandang sebagai perbedaan belaka, tetapi juga sebagai

pertentangan atau konflik. Tantangan yang dihadapi masyarakat adalah bukan menghilangkan perbedaan dan pertentangan, melainkan bagaimana mengelola secara kreatif sehingga mewujudkan dalam *cooperation* dan *competition* (Effendi, Djohan, 1999: 11)

2. Konflik Sosial: Pengertian, Faktor penyebab, dan Bentuknya

a. Pengertian

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak dapat dihindarkan dan sering bersifat kreatif, konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa adanya kekerasan, sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.

Konflik dapat diartikan pertikaian, pertarungan yaitu suatu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai atau norma-norma yang berlaku (Soekanto, 1983: 60).

Dapat dipahami bahwa konflik sosial adalah sebuah perjuangan terhadap nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan terhadap status kekuasaannya kelangkaan sumber daya, dimana tujuan dari konflik kelompok tidak hanya untuk memperoleh nilai-nilai yang diinginkan terjadi juga untuk menetralkan, melukai dan menyalahkan lawan-lawan mereka. Konflik tidak hanya terjadi antara individu dengan individu dan lainnya, individu dengan

kelompok, konflik dalam kelompok maupun antar kelompok. Konflik intergroup sudah inheren dalam kehidupan sosial.

Jika konflik selalu ditekan, masalah-masalah baru akan muncul di masa depan. Konflik itu sendiri mungkin saja menjadi suatu bagian dari solusi suatu masalah. Konflik dapat berubah menjadi kekerasan jika:

1. Saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai
2. Suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi
3. Banyak ketidakstabilan, ketidakadilan dan ketakutan dalam masyarakat yang luas.

Tujuan utama dari konflik biasanya adalah memenangkan apa yang dicapai, sehingga sasaran dari konflik adalah penghancuran pihak lawan. Kekalahan dan kehancuran pihak lawan sebagai suatu tujuan utama konflik untuk memenangkan keinginan yang akan dicapai. Hal senada juga diungkapkan Parsudi Suparlan (**Antropologi Indonesia, 1999: 1**) yang menyatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai suatu perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan tujuan yang sama-sama ingin dicapai. Untuk mencapai keinginan biasanya dalam masyarakat dilakukan dengan konflik atau persaingan, bedanya adalah persaingan lebih identik pencapaian tujuan kemenangan melalui keunggulan prestasi yang bersaing bukan penghancuran pihak lawan, sementara

konflik lebih identik dengan keinginan untuk menghancurkan pihak lawan.

Konflik akan berdampak luas terhadap masyarakat dan berakibat jangka panjang, sehingga menimbulkan trauma dan kepedihan yang dialami oleh masyarakat, seperti kepedihan, kehilangan, kesakitan dan mungkin kekerasan. Sehingga mengakibatkan terhalangnya kreativitas untuk berfikir dan mejalin hubungan dan bertindak. Lebih drastis lagi luka-luka ini dapat muncul dalam bentuk perilaku yang jahat terhadap masyarakat dan kelompok lain dan bisa menjadi legitimasi untuk memusnahkan lawa.

Kemenangan dalam konflik merupakan tujuan yang hendak dicapai, sehingga sasaran dari konflik adalah penghancuran pihak lawan. Kekalahan dan kehancuran pihak lawan sebagai suatu tujuan utama konflik untuk memenangkan keinginan yang akan dicapai. Konflik sosial dalam masyarakat umumnya terwujud dalam kontak fisik atau perang yang biasanya selalu terjadi berulang. Masalah yang timbul akibat terjadinya konflik sosial ini menjadi sangat penting jika mengancam dan menyebabkan rusaknya sistem sosial yang ada.

Akibatnya luka-luka baru yang lebih menyakitkan akan muncul. Proses yang sama juga akan berlangsung pada tingkat sosial. Jika suatu kelompok sudah diperlakukan sudah tidak adil atau menjadi korban kejahatan masa lalu, mereka akan cenderung teringat pada ketidakadilan itu, mereka akan takut hal yang sama akan terulang, dan mungkin juga mereka aktif

mencari kesempatan untuk melakukan balas dendam terhadap pihak yang dipandang sebagai musuh.

Walaupun demikian tidak selamanya konflik sosial itu mempunyai potensi yang menyebabkan rusaknya sistem sosial yang ada, tetapi juga justru membantu terwujudnya integrasi sosial seperti yang diungkapkan Lewis Coser, 1956 **(dalam Achmad Fedyani, 1986: 8-11)** :

“Konflik tidak selamanya bersifat negatif melainkan juga dapat bersifat positif dalam hal membantu mewujudkan rasa persatuan dan kesadaran akan hidup bermasyarakat”

Pada saat yang bersamaan dengan terciptanya keadaan konflik dalam masyarakat, tercipta pula kondisi integrasi. Karena sesungguhnya kedua struktur sosial yang lebih luas yakni struktur sosial masyarakat dimana kebudayaan masyarakat menjadi pegangan umum. Dengan kata lain bahwa struktur sosial tidaklah statis melainkan mempunyai dorongan untuk bersifat dinamis.

Konflik pada tataran tertentu tetap berguna, dan jika konflik itu selalu ada, berarti konflik itu memang dibutuhkan. Mengingat manfaat dari konflik tersebut membuat orang-orang menyadari adanya banyak masalah, mendorong kearah perubahan yang diperlukan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, mendorong kedewasaan psikologis, dan menimbulkan kesenangan **(Simon Fisher dkk, 2000: 4-5)**.

b. Faktor Pendorong Terjadinya Konflik

Konflik merupakan suatu yang endemik atau yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat merupakan suatu organisasi sosial yang terdiri dari berbagai aspek, strata, sarat dengan berbagai kepentingan. Perbedaannya hanya terletak pada tinggi atau rendahnya saja tingkat konflik yang terjadi. Dahrendrof **(1986: 306)** mengemukakan; kehidupan manusia dalam bermasyarakat didasari oleh konflik kekuatan, yang bukan semata-mata dikarenakan oleh sebab-sebab ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Karl Marx, melainkan karena berbagai aspek yang ada dalam masyarakat, yang dilihat sebagai organisasi sosial.

Terjadinya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, pertama faktor budaya psikologis. Pemicu dari faktor ini antara lain berkaitan dengan adanya perbedaan budaya yang terdapat dalam kelompok etnis/agama yang sedang mengadakan hubungan. Perbedaan budaya antara satu kelompok dengan kelompok lain dapat ditemukan dalam bentuk sistem nilai budaya (*culture value system*) dan orientasi nilai budaya (*culture value orientation*). Kedua unsur diatas menjelma secara kongkrit dalam bentuk mentalitas atau prilaku yang cenderung mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses atau program pembangunan dari kelompok yang bersangkutan **(Alqadari; dalam antropolog Indonesia, 1999: 37)**. Perilaku atau perubahan yang dilakukan oleh anggota atau kelompok etnis/agama tertentu umumnya pendatang yang sesuai dengan

kebiasaan, tradisi dan adat istiadat dari kelompok agama/etnis lainnya, khususnya etnis setempat cenderung menimbulkan keresahan, ketidakpuasan sebagaimana kasus suku Madura dengan Dayak di Sampit Kalimantan Tengah, dan juga suku Dayak dan Madura di Sambas Kalimantan Barat merupakan bentuk ketidakpuasan penduduk setempat atas pendatang. Kedua, faktor struktural yang berkaitan dengan ekonomi dan politik, dalam bentuk kompetisi sosial ekonomi dan politik yang tidak adil dapat memicu terjadinya konflik, apalagi jika pemerintah terlibat dalam mendominasi satu kelompok dan memarjinalkan kelompok lain.

Hendro Puspito (1993: 151-164) menyatakan ada empat faktor yang mendorong terjadinya konflik sosial keagamaan yaitu: perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan, serta mayoritas dan minoritas golongan agama.

1) *Budaya*

Dalam kehidupan sosial budaya, pada dasarnya masing-masing agama memiliki nilai-nilai budaya tertentu yang meliputi banyak hal: pola pikir, perilaku, upacara keagamaan, kitab suci, rumah ibadah, kesenian, makanan, pakaian serta simbol-simbol keagamaan. Semua itu sangat di dihormati dan dijaga bahkan hal itu dianggap sakral oleh sebagian masyarakat agama. Karena itu dalam segala aktivitas dan tingkah laku, tidak selayaknya tertuju baik sengaja maupun tidak, terhadap hal-hal yang memiliki nilai-nilai budaya tersebut akan menimbulkan rasa

ketersinggungan bahkan kemarahan pihak pemeluk agama yang merasa tertekan oleh perbuatan atau perilaku pihak lainnya.

2). Persaingan antar ras dan suku, penduduk asli-pendatang (minoritas dan mayoritas golongan agama)

Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat prularis dalam hal ras dan suku bangsa pada satu sisi merupakan suatu dinamika yang indah bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tetapi pada sisi lain kondisi ini dapat menjadi ancaman terhadap kerukunan bangsa karena pada dasarnya memiliki karakteristik berbeda dengan karakteristik suku lainnya. Konflik akan mudah tersulut jika dalam suatu wilayah yang heterogen dalam hal ras atau suku terjadi kesenjangan dalam bidang ekonomi dan kekuasaan.

Pada sisi lain para pendatang atau imigran biasanya memiliki etos kerja lebih tinggi sehingga mencapai status sosial lebih tinggi dibanding penduduk asli. Kondisi ini seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik antar penduduk asli (asli dan pendatang) disaat penduduk asli tidak terkait dengan komunitas suku dan agama tertentu, yang berbeda dengan suku dan agama pendatang maka potensi konflik terhadap perbedaan suku dan agama akan menjadi lebih besar.

3) Kesenjangan Ekonomi

Pada kenyataannya etos kerja para migran yang biasanya tinggi menempatkan mereka pada pada posisi ekonomi sosial yang tinggi. Sedangkan penduduk asli cenderung statis karena kurang memiliki motivasi kerja seperti halnya para imigran.

Kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang dapat menjadi salah satu faktor pemicu (*triggering factor*) terjadinya ketidakrukunan.

3. Kerukunan

a. Pengertian

Interaksi sosial pada dasarnya akan menimbulkan dua bentuk yaitu asosiatif yang berimplikasi pada kerukunan (integrasi, terpadu dalam satu kesatuan) dan dissosiatif yang berimplikasi pada konflik sosial. Menurut Horaby (1987: 444) integrasi merupakan kata kerja *integrate* yang berarti *combine (parts) into whole: bring or come into equal membership of society; and racial, ect.* Fokus dari interaksi sosial adalah bagaimana sistem-sistem, lembaga-lembaga sosial yang saling terkait dan saling menunjang, sebagaimana tulisan Kuntowijoyo yang mengutip pendapat Myron Weiner (**Republika, 15 Desember 2000**) dengan definisi sebagai berikut: *which hold a society and a political system together*, berarti keterkaitan sistem-sistem dan lembaga sosial yang menunjang.

Kerukunan dalam masyarakat pada dasarnya dapat terwujud jika proses sosial dan tindakan-tindakan sosial dapat saling bekerjasama dalam membangun masyarakat. Karena itu proses-proses sosial mempunyai fungsi-fungsi yang menekankan tujuan untuk terwujudnya kehidupan sosial dan masyarakat yang bercorak keseimbangan atau *equilibrium* di antara unsur-unsurnya, sehingga menghasilkan kerukunan

dalam masyarakat, kerukunan dapat terwujud jika masing-masing komponen dalam masyarakat dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan.

Masyarakat bila dilihat dari perspektif teori-teori fungsionalisme Person bagaikan organisme biologi dari tubuh manusia, yang saling ketergantungan satu sama lain, sebagaimana Alvin (1990: 20) mengutip teori-teori fungsionalisme Persons yang menjelaskan:

...the different parts of a biological organism can be said to correspond to the different institutions that make up a society. Just as the parts that make up biological organism (such as the eye and the hand) are interrelated and interdependent in their interaction with one another, so the institutions in a society (such as the economy and the government) are closely related to one another. Parsons use the concept of system to denote the harmonious among institutions...

Jadi menurut teori fungsional Parsons dapat disimpulkan bahwa masyarakatpun dalam melaksanakan fungsi-fungsi di antara institusi yang ada saling ketergantungan yang sangat tinggi sebagaimana saling ketergantungan sistem-sistem organisme dalam tubuh manusia.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kerukunan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya, konsekwensi dari interaksi ini menimbulkan dua kemungkinan, baik yang bersifat konflik maupun integrasi (kerukunan). Jhonson (1986: 181-184) yang mengutip pendapat Durkheim menyatakan masyarakat pada dasarnya terbagi dua tipe; pertama tipe masyarakat dengan solidaritas mekanis dan tipe masyarakat solidaritas organis. Jika masyarakat itu terdiri dari tingkat homogenitas yang sangat tinggi dalam kepercayaan, sentimen dan sebagainya, serta pembagian kerja yang sangat minim maka digolongkan pada masyarakat mekanis.

Integrasi sosial masyarakat dapat dicapai melalui hukum menekan (*represif*), sementara jika masyarakat itu terdiri dari tingkat heterogenitas yang sangat tinggi satu sama lain maka digolongkan pada masyarakat organis. Hukum restitutif yang mempertahankan dan melindungi saling ketergantungan yang kompleks antar berbagai individu dalam masyarakat ini sangat diperlukan dalam mewujudkan kerukunan.

Untuk mengelola konflik diperlukan beberapa teori yang membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dengan metode dan sasaran yang berbeda, teori tersebut antara lain. (Simon Fisher dkk, 2000: 8)

a. Teori Hubungan Masyarakat

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik. Kedua, mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

b. Teori Negosiasi Prinsip

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai: membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka dari pada posisi tertentu yang sudah tetap. Kedua, melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

c. Teori Kebutuhan Manusia.

Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering

merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini antara lain membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan juga agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

d. Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasarannya adalah melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antar pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka, serta meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

Geertz (**dalam Roland Robertson, 1988: 207**) menjelaskan: konflik bisa diredam sehingga terciptanya integrasi sosial dengan *pertama*: perasaan memiliki satu kebudayaan termasuk makin pentingnya nilai-nilai nasionalisme, *kedua* munculnya berbagai individu atau kelompok-kelompok tipe campuran yang berfungsi sebagai perantara sehingga terjadi keseimbangan dalam struktur. *Ketiga*, toleransi umum yang didasarkan atas suatu relativisme kontekstual yang menganggap

nilai-nilai tertentu sesuai dengan konteksnya. *Keempat*, pertumbuhan mekanisme sosial yang mantap menuju kepada bentuk-bentuk integrasi sosial yang majemuk dan non sinkretis yang di dalamnya orang-orang yang memiliki pandangan berbagai sosial dan nilai-nilai dasar yang berbeda secara radikal dapat bergaul dengan cukup baik satu sama lain untuk menjaga agar masyarakat tetap berfungsi.

Sedangkan menurut Iman Tholikhah (2004: 63) faktor-faktor yang mendukung terjadinya kerukunan umat beragama antara lain:

1. Aspek Ajaran Agama

Ajaran agama pada dasarnya bersifat universal yang mengandung unsur kasih sayang, tolong menolong, saling mencintai, bersikap adil terhadap sesama. **Hendro Puspito (1983)** melihat fungsi agama adalah memupuk persaudaraan, dimana masing-masing agama berhasil mempersatukan umatnya tanpa melihat perbedaan ras dan kebudayaan menjadi suatu komunitas besar sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian, sehingga keinginan untuk mencapai keinginan dimuka bumi dapat dilakukan melalui pendekatan agama. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk menjalin persaudaraan sebagai sesama manusia, antara sesama muslim dengan non muslim. Selama mereka menghormati hak-hak Islam (*al-Baqarab*: 256);

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Sementara itu umat kristiani mempunyai ajaran kasih sayang sebagai misi yang dibawa oleh Yesus tidak hanya ditujukan pada umatnya tetapi hendaknya di sebarkan untuk seluruh umat manusia. Setiap agama juga memiliki ajaran yang mengutuk perbuatan jahat, kebodohan, kemalasan maupun tindakan yang tidak berkemanusiaan. Dengan demikian, hidup rukun dan harmonis sesungguhnya merupakan dambaan seluruh umat beragama.

4. Aspek Sosial Budaya

a. Pembentukan Organisasi Lintas Agama

Organisasi ini diprakarsai oleh Departemen Agama (Depag) serta pimpinan atau tokoh umat beragama dalam suatu wadah Antar Umat Beragama, terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), Parsida Hidhu Dharma Pusat (PHDP) dan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI).

Di beberapa daerah wadah organisasi lintas agama juga tumbuh subur, di mana beberapa organisasi ini dibentuk atas inisiatif masyarakat dan diberi dukungan dana dan prasarana oleh pemerintah. Organisasi tersebut antara lain di Jakarta terdapat Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP),

di Medan Sumatera Utara, Forum Komunikasi Antar Pemuka Agama (FKPA), di Sumatera Selatan dinamakan Forum Komunikasi Umat Sumatera Selatan (FOKUSS), di Kalimantan Selatan, Banjar Baru terdapat Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUMA).

b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal bagi masyarakat suatu daerah tumbuh karena adanya adat istiadat setempat yang memiliki relasi antar pemeluk agama sehingga terciptanya suatu kerukunan. Di Jawa misalnya gotong royong, adat *siri* (menjaga harga diri) dan *peace* (solidaritas lokal) pada masyarakat bugis, sedangkan di Minangkabau adanya istilah *barek samo dipikul ringan sama dijinjing* (kebersamaan).

c. Aspek Hukum

- UU No 1/PNPS/1965, tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atas penodaan agama, beserta penjelasannya.
- Keputusan Menteri Agama dan Menteri dalam negeri No 1/Ber/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dan menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya.
- Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 Th 1979, Tanggal 2 Januari 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia.

B. Penelitian Yang Relevan

Kajian mengenai kerukunan dan konflik dalam masyarakat kita, tetap saja menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh tingkat kemajemukan masyarakat, antara lain kemajemukan agama dan etnis, yang begitu tinggi. Di samping itu, seringnya terjadi konflik antar pemeluk agama dan antar etnis dalam masyarakat kita, terutama sejak reformasi 1998, juga menjadi faktor pendorong maraknya studi tentang konflik ini.

Beberapa penelitian yang memfokuskan kajiannya terhadap kerukunan hidup beragama adalah:

1. Ahmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, (1986). Penelitian ini secara mendalam mengkaji konflik dan integrasi yang terjadi antara dua kelompok sosial Islam, Muhammadiyah dan NU, di Kecamatan Alabio Kalimantan Selatan. Setelah mengungkap tentang latar belakang dan bentuk konflik yang terjadi antara dua penganut faham yang berbeda tersebut, Fedyani mengemukakan faktor-faktor peredam konflik dimaksud. Menurutnya, paling tidak ada lima faktor peredam konflik yang terjadi dalam masyarakat Islam aabio tersebut, yakni kompleksitas dan modernisasi, berkembangnya kebudayaan Nasional, perubahan organisasi, kesadaran akan kesatuan kebudayaan tradisional, dan kehadiran golongan campuran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti IAIN Bukittinggi 2005 yang bekerjasama dengan BALITBANG Kemenag RI. Dengan judul *Deskripsi Potensi Kerukunan dan Konflik Antar Umat Beragama di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*. Penelitian ini memfokuskan pada potensi kerukunan dan potensi konflik yang terjadi pada masyarakat Kinali, karena pada masyarakat Kinali secara etnis, agama dan budaya terdapat kemajemukan, sehingga sangat mudah bagi terciptanya konflik terbuka antara masyarakat. Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik adalah 1) Pemahaman keagamaan yang sempit. 2) Terabaikannya Norma yang dianut, 3) Tokoh Agama Pendatang, 4) Kesenjangan Ekonomi. Sebaliknya, faktor pendorong terwujudnya kerukunan, antara lain adalah 1) Ajaran Agama yang Luhur, 2) Pengakuan Adat terhadap warga Pendatang, 3) Budaya Plural, 4) Rasa Nasionalisme, 5) Kepemimpinan yang Moderat.

Memang tidak mudah untuk mengukuhkan semangat kebersamaan atau kerukunan tanpa melihat asal usul suku, ras dan agama. Karena itu berdasarkan penelitian yang dilakukan, perlunya pendekatan serius yang harus dilakukan oleh tokoh agama, masyarakat dan pemerintah. Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah perlunya menggelar dialog antar umat beragama sebagai jalan alternatif yang lebih tepat untuk mengatasi konflik

yaitu dengan mengembangkan sinergi antara dialog struktural atau formal (intelektual teologis) di kalangan elit, dan dialog kultural di kalangan bawah. Sebab bila salah satu aspek saja yang diambil, tentu kegiatan itu tidak berjalan seimbang, atau bisa jadi tidak akan segera menemukan target sasaran yang jitu dan tepat waktu.

3. Rusmin Tumanggor, *Kerukunan Hidup dalam Konsepsi Lintas Etnis di DKI Jakarta (Studi Integritas dan Krisis Integrasi)*. Penelitian ini berangkat dari kenyataan banyaknya terjadi konflik antar etnis, terutama sejak reformasi berlangsung, padahal sebelum reformasi, bahkan semenjak masa penjajahan sekalipun, keutuhan antar etnis nampak kokoh. Permasalahan yang dikedepankan adalah Mengapa bisa kerusuhan yang terkesan antar etnis itu muncul dengan dahsyat, padahal sebelumnya terlihat penuh kerukunan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kerukunan dalam konsepsi berbagai etnis di DKI Jakarta merupakan idaman semua suku bangsa yang ada di DKI. Hanya saja perbedaan dalam kemauan dan perwujudan sikap dan perilaku yang tidak terkondisikan dengan baik dalam forum komunikasi lintas etnis nampaknya tidak menonjol ke permukaan, tetapi lebih mengemuka dalam alasan peluang kerja dan ekonomi, untuk penghujutan hidup, wilayah dan institusi, lalu terbawa etnis dan merembet ke agama.

Di samping beberapa penelitian di atas masih banyak lagi penelitian lain yang mengarahkan perhatiannya terhadap persoalan kerukunan dan konflik. Seperti yang dijumpai pada temu riset Nasional II di Makasar 24-27 Agustus 2004, yang diadakan oleh BALITBANG Agama dan Diklat Keagamaan, Kemenag RI. paling tidak menyertakan tiga judul tentang konflik, antara lain, Khuzaimah Batubara, *Konflik Sosial di Kota Medan; analisa terhadap faktor-faktor pemicu dan peredam konflik*. Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap tingkat/kondisi konflik sosial antarumat beragama di kota Medan, menjelaskan faktor pemicu dan peredam konflik, serta merumuskan usaha yang mungkin dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa konflik terbuka antara penganut agama tidak terjadi di Kota Medan, konflik lebih bersifat tertutup. Faktor pemicunya adalah fanatisme beragama, adanya profokator, pendirian rumah ibadah, dan perkawinan berbeda agama. Upaya penanggulangan yang mungkin dilakukan adalah dialog antar tokoh agama secara terbuka dan menyeluruh, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama.

Begitu pula pada Jurnal Harmoni yang diterbitkan oleh Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, volume III, 2004, dijumpai sejumlah judul yang membahas tentang ini, antara lain, Sungadji, *Konflik Sosial-Religi di Maluku Utara dan Solusinya*. Penelitian tentang aktualisasi kerukunan ini secara mendalam

mengangkat faktor pemicu terjadinya konflik dan faktor pendorong cepatnya penyelesaian konflik. Faktor penyebab terjadinya konflik bukanlah faktor agama melainkan persaingan elit politik lokal untuk memperebutkan di Maluku Utara, pasca keluarnya UU no. 46 tahun 1999 tentang berdirinya propinsi baru, Maluku Utara. Juga disebabkan oleh persaingan untuk menguasai sumber tambang emas di daerah Kao Malifut. Di samping itu, juga disebabkan oleh pola pemukiman yang tersegregasi menurut agama. Adapun pendorong cepatnya penyelesaian konflik adalah karena penyelesaiannya berasal dari bawah, dari pimpinan komunitas-komunitas yang berkonflik, kemudian pemerintah memfasilitasi perdamaian yang telah tercipta dari bawah tersebut.

Khusus untuk Kota Bukittinggi penelitian mengenai kerukunan antar umat beragama belum pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh IAIN Bukittinggi yang berjudul *Peta Keagamaan Bukittinggi*. Masih belum menyentuh aspek kerukunan dan konflik yang dapat terjadi dalam masyarakat. Fokus dari penelitian tersebut adalah pemetaan terhadap pemeluk agama, berapa jumlah penduduk berdasarkan agama, sarana ibadah dan sejauh mana ketaatan masing-masing pemeluk agama dalam menjalankan ibadah, sehingga dalam penelitian tersebut tergambar bagaimana kondisi masyarakat terhadap aktivitas keagamaannya.

Oleh karena itu penelitian tentang potensi kerukunan dan konflik antarumat beragama di Bukittinggi ini penting

dilakukan karena Bukittinggi merupakan kota perdagangan dan wisata selain juga sebagai kota pendidikan, dimana terjadinya persinggahan budaya dan agama yang dibawa oleh para wisatawan, pedagang dan pelajar yang berada di luar kota Bukittinggi.

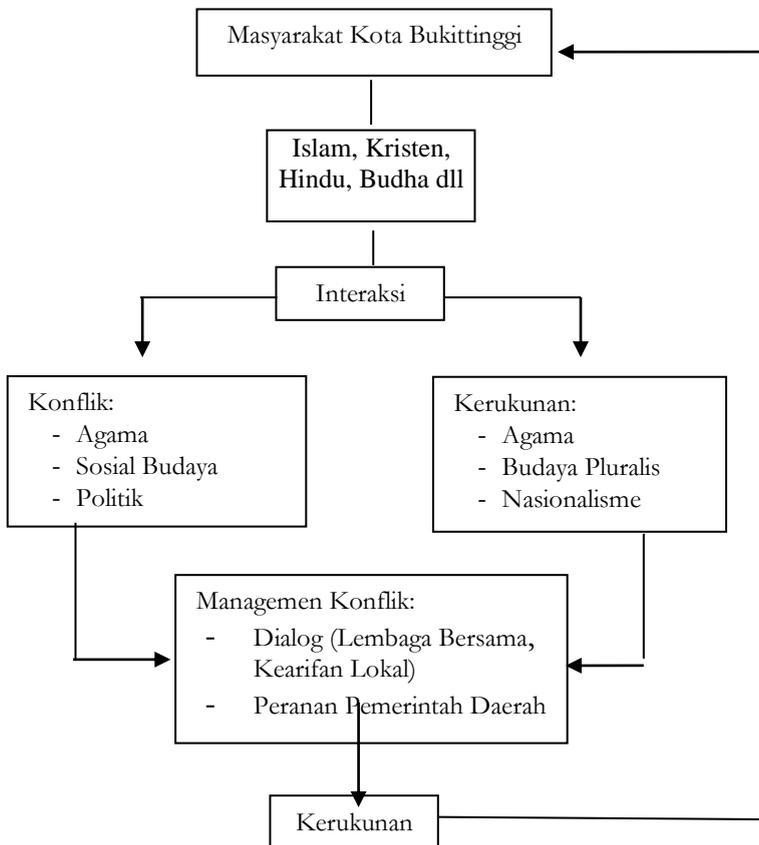
Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya gesekan-gesekan kecil yang bisa berdampak luas terhadap kerukunan hidup antar umat beragama, seperti perkelahian pelajar yang ujung-ujungnya berdampak pada RAS, dan berakhir dengan pertikaian antar agama, karena persoalan agama sangat sensitif bagi masyarakat yang heterogen. Dibeberapa daerah yang dilanda kerusuhan antara lain Ambon, Sampit dan lain-lain merupakan refleksi dari rendahnya komunikasi yang coba dibangun oleh komunitas agama sehingga sangat berdampak luas terhadap kelangsungan hidup manusia.

Namun untuk Kota Bukittinggi yang dinilai cukup heterogen konflik terbuka antarumat beragama belum pernah terjadi, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa riak-riak persilihan akan tercipta ketika tidak adanya peraturan-peraturan yang mengikat serta tidak adanya forum dialog yang mencoba untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Bukittinggi.

Komunikasi antar umat beragama harus terus dibangun dengan landasan adanya sikap saling percaya, toleransi dan saling memahami kondisi yang dihadapi oleh masing-masing umat beragama. Membangun komunikasi dengan cara membuat

saluran dialog antar umat bergama memang sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang heterogen, mengingat ketika ada riak-riak yang menjurus kepada hal-hal yang bernuanasa agama, akan dapat dibicarakan dalam dialog antar umat beragama sehingga kondisi tersebut dapat diantisipasi secepat mungkin. Karena salah satu fungsi dari forum dialog adalah mengkomunikasikan segala persoalan keagamaan dan kesukuan terhadap masyarakat pemeluk agama.

C. Kerangka Berfikir



BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Monografi Bukittinggi

1. Letak Geografis

Kota Bukittinggi secara geografis terletak antara $100^{\circ}.20$ - $100^{\circ}.25$ BT dan $00^{\circ}.20$ LS, dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut. Luas daerah lebih kurang 25.239 Km. Namun dalam kenyataannya luas wilayah yang efektif yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya seluas 1.132,39 Ha. Sedangkan sisanya merupakan perbukitan, lembah dan ngarai yang kurang potensial untuk pembangunan fisik kota (**Bukittinggi Dalam Angka**).

Sebelum menjadi kota yang berdiri sendiri, Bukittinggi adalah bagian dari Kabupaten Agam, bahkan merupakan Ibukota Kabupaten Agam sebelum di pindahkan ke Lubuk Basung, walaupun ibukota Agam sudah dipindahkan namun predikat sebagai *koto rang Agam* (kota orang Agam) tetap melekat pada kota Bukittinggi. Hal ini lebih jelas dalam kenyataannya sampai sekarang, Bukittinggi memang menjadi sentral perekonomian bagi masyarakat Agam dan sekitarnya.

Sebagai kota pemerintahan Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan; Kecamatan Guguak Panjang, Kecamatan Mandiangin

Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) dan 24 kelurahan. Dari tiga kecamatan tersebut, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya yaitu 12.156 Km², Kecamatan Guguk Panjang yaitu 6.831 Km². Sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh 6,252 Km². Bukittinggi berbatasan sebelah timur dengan Nagari Ampek Angkek, sebelah Barat dengan Ngarai (Guguak, Koto Gadang dan Sianok), sebelah Selatan dengan Banuhampu dan sebelah Utara dengan Nagari Gadut dan Kapau.

Pertumbuhan Kota Bukittinggi dari tahun ketahun selalu bervariasi, bila pada periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,72% pada dasarwasa berikut yakni pada tahun 1990-1999 laju peningkatan jumlah penduduk justru berkurang hanya menjadi 0,70%. Namun bila tingkat pertumbuhan ini dilihat dari perkembangan penduduk kecamatan, ternyata laju pertumbuhan ini tidaklah merata. Jumlah penduduk di Aur Birugo Tigo Baleh tumbuh sekitar 1,24% kemudian disusul oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan pertumbuhan sebesar 1,01% dan Kecamatan Guguk Panjang dengan pertumbuhan sebesar 0,21%. **(Azizah Etek dkk, Bukittinggi 2004: 267-268)**

Pada tahun 1998 kepadatan penduduk rata-rata kota ini berkisar sekitar 3.512 orang/Km², dibandingkan dengan tahun 1990 dimana kepadatan penduduk baru mencapai 3.321 orang/Km². Ini berarti ada peningkatan kepadatan penduduk

dari tahun ke tahun. Peningkatan kepadatan penduduk ini sangat memungkinkan, karena wilayah kota Bukittinggi dari zaman kemerdekaan sampai sekarang sama sekali tidak mengalami perubahan. Sementara dalam kurun waktu tersebut telah terjadi penambahan penduduk, baik karena kelahiran, maupun urbanisasi, karena posisi Bukittinggi sebagai salah satu sentra perdagangan di wilayah Sumatera Barat.

Dilihat dari segi jumlah penduduk, Kota Bukittinggi memang masih tergolong kota sedang dengan penduduk sebanyak 98.551 jiwa(sesuai sensus tahun 2003) dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2002-2003 adalah 2,04 persen pertahun. Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi mulai merata dimana sebelumnya terkonsentrasi pada kecamatan Guguk Panjang, tahun ini mulai menyebar ke Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, distribusi penyebaran penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Persentase Penyebaran Penduduk Kota Bukittinggi

NO	KECAMATAN	LK	PR	JMLH	PERSENTASE
1	Mandiangin Koto	19.126	19.766	38.892	39,46
2	Guguk Panjang	18.752	19.032	37.784	38,35
3	Aur Birogo Tigo	10.805	11.070	21.875	22,19
Jumlah		48.683	49.868	98.551	100,00

Sumber Data: Bukittinggi Dalam Angka

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persentase penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan jumlah penduduk 38.892 jiwa dan penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 21.875 jiwa, sedangkan Guguk Panjang 37.784 jiwa.

Namun jumlah ini hanya merupakan penduduk resmi yang menetap di kota ini, sedangkan jumlah orang yang berada di kota ini pada siang hari jauh lebih banyak dan diperkirakan mencapai 300.000 s/d 350.000 orang. Tambahan jumlah penduduk ini diperoleh dari kehadiran para pekerja, pengusaha/pedagang serta para pendatang yang berkunjung dari daerah lain.

Kondisi telah menimbulkan beban terhadap aktivitas pemerintah kota Bukittinggi, khususnya dalam pengadaan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas publik saat ini, karena jumlah penduduk yang cukup padat dibanding dengan luas kota. Maka diwaktu-waktu tertentu seperti liburan dan hari raya Islam kota Bukittinggi terasa begitu sesak. Jika kondisi ini tidak diantisipasi lebih lanjut maka akan berpengaruh kepada kenyamanan publik. Hal ini tentu akan sangat merugikan dalam kedudukannya sebagai kota pariwisata paling terkemuka di Sumatera Barat. (Ibid: 268)

Posisi letak geografis yang begitu strategis serta iklimnya

yang sejuk, ditunjang dengan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang dimilikinya, telah menjadikan Kota Bukittinggi tempat yang menarik bagi para pendatang. Pendatang-pendatang tersebut berimigrasi dan melakukan urbanisasi. Karena Bukittinggi sekarang menjadi kota yang terbuka, karena penduduk kota ini tidak saja terdiri dari masyarakat Kurai (sebagai penduduk aslinya) serta masyarakat Minang dan berbagai daerah/nagari yang ada di Sumatera Barat, melainkan juga menarik suku-suku lain di Nusantara. Seperti Suku Jawa, Sunda, Batak, Nias dan lain-lain, bahkan juga berasal dari golongan etnis/bangsa lain seperti Tionghoa, India dan Pakistan.

Pembaruan berbagai komponen masyarakat yang berasal dari berbagai daerah asal ini dalam kehidupan sehari-hari berjalan dengan baik dan harmonis, sehingga kota Bukittinggi menjadi sangat kondusif untuk berbagai aktivitas pembangunan dan investasi, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maupun oleh para investor dan masyarakat luas.

Kota Bukittinggi merupakan dataran tinggi dengan cuaca yang cukup sejuk. Sebagian daerah adalah pemukiman penduduk dan pasar, sedangkan bagian lainnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dalam porsi yang sedikit sekali. Untuk lokasi pasar, sepertinya merupakan bagian wilayah yang cukup luas,

khususnya terdapat tiga pasar besar yang berada di Kecamatan Guguk Panjang, yaitu Pasar Aur Kilning, Pasar Atas, dan Pasar Bawah. Ketiga pasar ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Objek-objek wisata yang terdapat di Kota Bukittinggi antara lain Jam Gadang yang terletak di jantung kota Bukittinggi dengan ketinggian 26 meter. Di samping itu juga terdapat objek wisata Panorama Ngarai Sianok, Benteng, Lobang Jepang, Taman Margasatwa Kinantan, dan Jenjang seribu. Tempat-tempat ini banyak dikunjungi oleh turis mancanegara dan turis domestik.

2. Ekonomi

Secara geografis kota Bukittinggi terletak di jalur lintas Sumatera. Hal ini secara ekonomis memberikan dukungan yang kuat bagi gerak kehidupan ekonomi. Dibanding dengan kabupaten atau kota lain di Sumatera Barat, tingkat pertumbuhan ekonomi Bukittinggi merupakan yang paling tinggi. Dari data BPS tahun 1995-1999 tingkat pertumbuhan ekonomi Bukittinggi mencapai 3,89%.

Berbicara tentang ekonomi sangat erat kaitannya dengan sektor mata pencarian penduduk. Indeksi yang menyangkut komposisi penduduk menurut mata pencarian tersebut tentu dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai lapangan usaha atau kegiatan ekonomi penduduk setempat.

Sektor yang paling banyak memberi andil terhadap tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi ini

adalah sektor perdagangan, kemudian industri dan pertanian. Sektor perdagangan ini sekaligus merupakan sektor unggulan PEMDA. Di bukittinggi terdapat 3 sentra kegiatan perdagangan; Pasar Aur Kuning, Pasar Atas dan Bawah. Dari tiga pasar tersebut, Pasar Aur Kuning adalah yang paling luas yaitu 12.872 M2, dengan jumlah toko 1.340 unit dan luas los 3.415 M2 dengan daya tampung 3.557 petak los.

Bukittinggi memiliki sentral-sentral perdagangan yang biasa disebut dengan pasar. Beberapa pasar yang ada di Bukittinggi pada awalnya merupakan pasar-pasar yang tergolong pada pasar tradisional, namun karena pertumbuhan ekonomi dibidang perdagangan begitu cepat maka fungsi pasar tradisional tersebut berubah menjadi menjadi pasar yang menghasilkan berbagai pusat komoditi baik berupa pusat konveksi, elektronik dan lain-lain, ini dapat dilihat di Pasar Aur Kuning dan Pasar Atas. Namun sebagian lagi masih menjalankan fungsinya sebagai pasar yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti Pasar Bawah.

Pemberian nama pada pasar-pasar yang ada di Bukittinggi agaknya berdasarkan kondisi alamiahnya. Nama Pasar Atas diberikan karena letaknya di atas bukit, nama Pasar Lereng karena memang letaknya diatas lereng bukit. Sama halnya dengan nama Pasar Bawah karena lokasi pasar ini berada di dataran rendah Bukittinggi.

Jumlah pedagang menurut lokasi pasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Lokasi	Jumlah Pedagang (org)
1	Pasar Aur Kuning	4.897
2	Pasar Atas	1.153
3	Pasar Bawah	1.379
Jumlah		7.429

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah pedagang yang ada di Bukittinggi berjumlah sebanyak 7.429 orang, yang tersebar pada tiga pasar diatas, dimana pada Pasar Aur Kuning terdapat 4.879 orang, 1.153 orang terdapat di Pasar Atas dan sisanya 1.379 orang berada di Pasar Bawah.

Aktivitas berdagang merupakan jenis kegiatan yang cukup banyak di lakukan oleh warga Bukittinggi, selain pertanian dan pertukangan. Aktivitas berdagang ini di lakoni oleh para pedagang yang beragam, tidak hanya berasal dari Bukittinggi tetapi juga berasal luar Bukittinggi bahkan berasal dari luar Sumatera Barat.

Mereka berasal dari berbagai etnis tidak hanya etnis Minang tetapi juga terdapat warga pendatang seperti etnis China, Batak, Melayu dan Jawa. mereka yang berasal dari etnis Minang berasal dari daerah Agam, Payakumbuh, Pariaman, Pasaman dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan tidak hanya proses transaksi yang terjadi tetapi juga sebagai tempat pembauran budaya local dengan budaya lain, dan

lama kelamaan akan terjadi akulturasi budaya yang menciptakan terbentuknya budaya baru.

Beberapa komoditas yang diperdagangkan antara lain barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti sembako, barang kosmetik, obat-obatan, sayur-sayuran, buah-buahan, bahan konveksi, elektronik, dan lain-lain.

Untuk sektor industri di Bukittinggi dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat, kondisi ini dapat dilihat dari 772 perusahaan yang tercatat sebelum tahun 2000 meningkat menjadi 883 perusahaan, berarti kenaikannya mencapai 14,28%. Perusahaan ini terdiri dari 325 industri makanan dan minuman, 558 industri sandang dan kulit.

Sedangkan industri besar pada tahun 2000 mengalami penurunan, ini akibat dari bergesernya fungsi industri besar menjadi industri kecil. Sekarang hanya tinggal 8 perusahaan yang tersebar di dua kecamatan yaitu 7 perusahaan berada di Guguk Panjang dan 1 perusahaan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Sedangkan pada Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh tidak terdapat satupun industri yang berskala besar.

Sementara pada sektor pertanian, melihat kondisi daerah Bukittinggi yang lahan pertaniannya sedikit maka hasil pertaniannya pun tidak begitu banyak, hanya terdiri dari padi, palawija, perkebunan, peternakan dan perikanan. Untuk produksi padi atau luas lahan sawah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jumlah Luas Sawah, Tanaman, Panen dan Hasil Produksi Pada Tahun 2000

Kecamatan	Luas Sawah (ha)	Luas Tanaman (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ha)
Guguk Panjang	38.03	58.00	65.00	370.50
Mandiingin Koto Selayan	260.76	425.00	495.00	3.217.50
Aur Birugo Tigo Baleh	176.00	323.00	288.00	1.843.00
Jumlah	474.79	806.00	848.00	5.431.20

Sumber: BPS Bukittinggi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah lahan pertanian paling banyak terdapat di Kecamatan Mandiingin Koto Selayan seluas 260.76 ha, selanjutnya Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 176.00 dan luas sawah paling sedikit terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yang hanya 38.03 ha. Jadi jumlah luas sawah yang berada di Kota Bukittinggi berjumlah 474.79 ha, dengan jumlah produksi 5.431.20 ha pertahun.

3. Pendidikan

Bukittinggi tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan dan kota wisata tetapi Bukittinggi juga merupakan salah satu kota pendidikan dimana banyaknya siswa dan mahasiswa yang menimba ilmu pengetahuan di kota ini.

Menurut data yang diperoleh pada tahun 2003 jumlah SD, SLTP pada tahun 2003 masing-masing tercatat 57 unit, 10 unit. Sedangkan untuk perguruan tinggi mengalami peningkatan

dimana bertambah 2 perguruan tinggi sehingga berjumlah 17 unit. Peningkatan juga terjadi pada jumlah lulusan Perguruan Tinggi/Akademi Negeri dan Swasta. Beberapa perguruan tinggi Negeri dan Swasta diantaranya IAIN Bukittinggi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), STIT Ahlussunnah, STKIP Ahlussunnah, STIE Agus Salim, ABA Budi Dharma, Akademi Perawatan, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, dan lain sebagainya. Data pendidikan di Bukittinggi dapat dilihat pada label dibawah ini:

**Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Negeri dan Swasta**

No	Kecamatan	Negeri (SMU/MA)	Swasta (SMU/MA)	Jumlah
1	Guguk Panjang	4	13	17
2	Mandiingin Koto Selavan	3	2	5
3	Aur Birogo Tigo	2	2	4

Sumber Data: Bukittinggi Dalam Angka

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah SMU/MA yang terdapat di kota Bukittinggi berjumlah 26 sekolah, dimana terdapat jumlah SMU/MA yang terbanyak terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu sebanyak 17 sekolah, sedangkan di Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh terdapat 4 sekolah.

Ada sisi positif dan negatif dari banyaknya pelajar atau mahasiswa yang datang untuk melanjutkan pendidikan di kota Bukittinggi. Dari sisi positif kedatangan pelajar dan mahasiswa

dari berbagai daerah yang mungkin saja dari berbagai daerah berbeda budaya, adat dan agama akan mendatangkan incaran yang cukup signifikan bagi penduduk Bukittinggi, terutama bagi pedagang dan pemilik rumah kos, akan tetap dari sisi negatif kedatangan pelajar dan mahasiswa ini akan menimbulkan kerawanan terhadap munculnya berbagai persoalan di masyarakat.

Usaha untuk mencegah agar kerawanan yang terjadi pada pelajar atau mahasiswa memerlukan sebuah program yang baik sehingga berbagai persoalan dapat diminimalisir.

Respon yang positif dari pemerintah kota Bukittinggi terhadap dunia pendidikan selayaknya menjadi perhatian yang cukup serius, dan kondisi ini coba di tindak lanjuti oleh Departemen Pendidikan Bukittinggi untuk menciptakan para pelajar/siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas tetapi juga memiliki akidah dan moral yang baik, karena untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal tidak hanya memiliki kekuatan pada kemampuan saja melainkan juga diperkuat dengan akidah dan moral. Program ini dirancang atas kerjasama beberapa pihak antara lain para akademisi, guru dan lain-lain dengan Diknas Kota Bukittinggi, program ini di beri nama dengan Pendidikan Berbasis Akidah.

Program ini dirancang sedemikian rupa untuk menanamkan aqidah sedini mungkin kepada anak didik. Akidah dan sendi-sendi moral etik mesti ditanamkan sejak usia dini. Karena usia pra-sekolah, pendidikan dasar dan kelanjutan, merupakan masa

pertumbuhan, pengenalan lingkungan serta perubahan dari remaja menuju dewasa. Tingkat usia inilah yang mesti dibekali pendidikan akidah secara tepat, sehingga mereka memiliki benteng yang kokoh, yakni iman dan taqwa.

4. Pemerintahan

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang memiliki dinamika pemerintahan lokal yang cukup panjang. Dinamika itu tidak saja meliputi bentuk-bentuk pemerintahan modern yang saat ini banyak dikenal kalangan, tetapi juga meliputi bentuk dan struktur pemerintahan masa lalu, dimana wilayah kota Bukittinggi (sekarang) dulunya merupakan wilayah kenagarian Kurai Limo Jorong. Peralihan bentuk dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan modern tersebut meliputi masa yang cukup panjang, mulai dari masa penjajahan kolonial Belanda yang meliputi beberapa fase perkembangan bentuk pemerintahan di zaman kemerdekaan mulai dari orde lama, orde baru dan orde reformasi **(Azizah dkk, Jakarta: 2004)**

Dinamika pemerintahan lokal dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa masih terpisah-pisah. Bahkan beberapa literatur yang menulis secara lengkap perkembangan pemerintahan kota Bukittinggi dari zaman kemerdekaan relatif tidak ditemukan, kecuali beberapa dokumen pemerintahan yang saat ini sebagian masih terdapat di jajaran pemerintahan, Bukittinggi pernah menempati peranan yang sangat sentral, baik

pada penjajahan Belanda, maupun pada zaman kemerdekaan dan setelah kemerdekaan.

Bahkan di awal kemerdekaan, Bukittinggi pernah menjadi Ibukota PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Secara kronologis semua dinamika pemerintahan Kota Bukittinggi tersebut dapat dilihat sebagai sebuah acuan untuk kembali mempertahankan identitas sebagai sebuah pemerintahan yang di akui tidak hanya ditingkat lokal tetapi juga pada tingkat nasional.

Perubahan pola pengelolaan negara yang semula cenderung represif dan otoriter, serta sentralistis yang sangat kental menuju satu suasana yang lebih egaliter dengan mengedepankan demokratisasi di seluruh bidang kehidupan, serta penerapan sistem desentralisasi pemerintahan dengan memberikan otonomi yang lebih nyata, tentu tidak dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Perubahan-perubahan mendasar dalam mengelola negara dan pemerintahan tersebut memerlukan suatu masa transisi yang memadai, sehingga proses perubahan ini betul-betul terjadi sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintahan Kota Bukittinggi sebagaimana halnya kota-kota lain di Nusantara menghadapi beberapa masalah yang cukup kompleks. Persoalan diawali dengan munculnya instabilitas dalam kehidupan politik dan keamanan yang merupakan dampak lanjutan dari krisis ekonomi dan moneter

yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Kondisi ini terus bergilir dan berlanjut menjadi krisis multidimensi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga akhirnya krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun tidak dapat dihindari.

Hal yang sama dihadapi oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Dimana sangat banyak sorotan dan kritik yang tajam terhadap kebijakan pemerintahan kota dan aktivitas aparatur penyelenggara. Munculnya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat telah melahirkan dimensi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bukittinggi. Pemerintahan kota yang semula hanya sekedar menyelenggarakan kegiatan pemerintah sebagaimana adanya, sekarang dituntut untuk merespon langsung tuntutan dan keinginan masyarakat. Kondisi ini membuat pemerintah kota Bukittinggi kembali merekonstruksi semua kegiatan pemerintahan yang telah dan yang akan dilakukan sehingga dapat menjawab semua tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Pada saat ini Bukittinggi di pimpin oleh H. Jufri untuk periode lima tahun mendatang (2005-2010), proses pemilihan kepala daerah yang berlangsung sekarang berbeda dari proses sebelumnya dimana kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga tidak lagi kongkalingkong politik yang terjadi di DPRD.

Beberapa kebijakan yang coba direkonstruksi kembali

oleh pemerintahan kota Bukittinggi seperti pembuatan beberapa kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak, pemerintah kota mencoba untuk melibatkan unsur-unsur dari masyarakat dalam jumlah yang lebih banyak. Tidak hanya tokoh masyarakat yang dilibatkan, namun juga pelaku dari kalangan-kalangan organisasi, akademisi dan pemerhati masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Kondisi perubahan terhadap performance pemerintahan ini telah mendorong semua pihak di lingkungan pemerintah kota Bukittinggi untuk berbenah diri, baik itu pembenahan yang berkaitan dengan kualitas kinerja maupun perilaku pemerintahan.

Dalam bidang kehidupan keagamaan juga menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Bukittinggi di bawah kepemimpinan H. Jufri dan merupakan bidang yang memberikan kontribusi besar dalam pencapaian visi dan misi Kota Bukittinggi. Visi dan misi yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kota tersebut adalah sebagai berikut: Visi: "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah yang dijiwai oleh agama dan adat, syara' mangato dan adat mamakai". Misi: *pertama*, Mewujudkan masyarakat berbudaya, dan beradat berdasarkan iman dan taqwa. *Kedua*, Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, yang memiliki ilmu pengetahuan dan moral yang luhur. *Ketiga*, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung. *Keempat*, Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

B. PETA KEHIDUPAN KEAGAMAAN

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Mayoritas penduduk kota Bukittinggi beragama Islam disamping agama-agama lainnya, penganut agama Islam di Bukittinggi berjumlah 90.107 orang (97,1%). Disamping itu pula terdapat penganut agama lain yaitu agama Kristen berjumlah 2.415 orang (2,6%), sedangkan Hindu dan Buddha masing-masing berjumlah 12 orang (0,01%) dan 212 orang (0,02%). Penganut agama Kristen ini berasal dari para pendatang yang berasal dari suku bangsa Batak, Jawa dan China. Jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Kecamatan			Jumlah
		Guguk Panjang	MKS	ABTB	
1	Islam	36.811	33.398	19.989	90.107
2	Katolik	682	457	140	1.279
3	Protestan	419	489	228	1.136
4	Hindu	9	3	-	12
5	Buddha	183	25	4	212
6	Lainnya	4	11	7	22

Sumber Data: Bukittinggi Dalam Angka

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pemeluk agama tersebar di tiga kecamatan di Kota Bukittinggi, dengan jumlah 90.107 orang, yang tersebar di tiga kecamatan, 36.811 orang berada di Kecamatan Guguk Panjang, 33.398 orang di

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan 19.989 orang di Kecamatan Air Birogo Tigo Baleh. Sedangkan pemeluk agama lain seperti Kristen Katoik berjumlah 1.279 orang, Kristen Protestan berjumlah 1.136 orang, Hindu berjumlah 12 orang dan Budha berjumlah 212 orang.

Suasana Islam terasa sekali di Kota Bukittinggi. Hal ini disebabkan karena sebagian warga termasuk penganut agama Islam yang taat. Sesuai dengan falsafah adat Minang yaitu "*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*", falsafah ini menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya. Jadi dengan demikian, semua kebiasaan atau adat istiadat yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari selalu mengacu kepada ajaran Islam.

Kegiatan warga dalam menjalankan syariat Islam yang dipeluknya secara turun temurun itu tercermin dalam ajaran Islam itu sendiri yang dikenal dengan rukun Islam yang lima dan rukun iman yang keenam, ibadah ini sering diingatkan oleh ibu/bapak dan mamak-mamak kepada anak dan kemenakannya.

Dalam upaya pembinaan umat yang bersifat keagamaan ini warga masyarakat selalu melakukan sholat berjamaah di Masjid atau surau juga tidak jarang menyelenggarakan wirid dan pengajian. Organisasi atau perkumpulan tersebut terwujud dengan terbentuknya Majelis-Majelis Taklim yang selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Disisi lain keberadaan agama selain Islam (Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain), juga melakukan ritual-ritual keagamaan. Misalnya umat Kritiani selalu melakukan ibadah seperti Perayaan Ekaristi harian dan mingguan, kondisi Perayaan ini yang dilakukan begitu khusu' tanpa ada gangguan dari pihak lain, mereka melakukan ibadah dengan tenang. Begitu juga dengan umat Buddha mereka melakukan sembahyang di Vihara pada setiap sabtu sore dengan mendatangkan guru agama dari Padang.

Rutinitas yang dilakukan oleh agama Kristen, Buddha, Hindu dalam menjalankan ibadah berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari pihak lain ini wujud dari kerukunan hidup beragama cukup tinggi di Kota Bukittinggi.

Tabel: Rumah Ibadah di Bukittinggi

No	Kecamatan	Masjid /Mushala	Gereja	Wihara
1	Guguk Panjang	65	2	1
2	Aur Birogo Tigo Baleh	51	-	-
3	Mandiangan Koto Selayan	48	-	-
Jumlah		164	1	1

Sumber Data: Bukitlinggi Dalam Angka

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah masjid yang ada dikota Bukittinggi adalah 25 buah, mushalla 129 buah, dan gereja 1. terlihat bahwa jumlah masjid dan mushalla mendominasi di ketiga kecamatan di kota Bukittinggi, Jumlah masjid paling banyak terdapat di Mandiangm Koto Selayan sebanyak 16 buah dan jumlah mushalla paling banyak terdapat di

Kecamatan Guguk Tigo Baleh sebanyak 52 buah, sedangkan Gereja hanya ada di Guguk Panjang dan tidak terdapat pada dua kecamatan lainnya di Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangan Koto Selayan tidak terdapat gereja. Untuk Wihara terdapat di Kecamatan Guguk Panjang.

Keberadaan Vihara ini menjadi kontroversi, karena tidak terdaftar secara resmi, namun hanya memiliki izin untuk beribadah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan lainnya dari pemerintah Kota Bukittinggi, tetapi bangunan tersebut tidak secara resmi disebut sebagai rumah ibadah. Karena proses untuk mendirikan rumah ibadah dilingkungan yang mayoritas penduduknya muslim cukup sulit, karena harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat.

Namun ada upaya dari umat Buddha untuk mendapatkan legitimasi yang lebih kuat untuk mendirikan rumah ibadah, dimana mereka sudah memiliki sebidang tanah yang sudah memiliki izin untuk dijadikan rumah ibadah, lokasinya masih berada di Kecamatan Guguk Panjang. Mereka hanya tinggal menunggu moment yang tepat untuk mendirikannya karena semua surat dan prosedural perizinan sudah mereka tempuh, sekaligus mengharapkan adanya keinginan yang baik dari pemerintah Kota Bukittinggi dan dukungan dari masyarakat setempat.

Sebagai ujung tombak dari penyampaian visi dan misi dakwah bagi masing-masing agama di Bukittinggi, para pemuka

agama memiliki peranan yang cukup penting dalam menciptakan suasana yang kondusif di Bukittinggi berkaitan dengan kehidupan keagamaan.

Tabel Jumlah Pemuka Agama

No	Kecamatan	Ulama/ Mubaligh	Pendeta	Pastor
1	Guguk Panjang	41	1	1
2	Aur Birogo Tigo Baleh	63	-	-
3	Mandiingin Koto Selayan	33	-	-
Jumlah		137	1	1

Sumber Data: Bukitlinggi Dalam Angka

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah ulama/mubaligh secara keseluruhan adalah 137 orang, 63 orang ulama/mubaligh berada di Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh, 41 orang berada di Kecamatan Guguk Panjang, sementara jumlah mubaligh yang terkecil terdapat di Kecamatan Mandiingm Koto Selayan yaitu sebanyak 33 orang. Untuk Pastor 1 orang yang terdapat di Kecamatan Guguk Panjang dan untuk Pendeta dari data diatas tidak terdapat di tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi.

Sebagai ujung tombak dari penyampaian visi dan misi dakwah bagi masing-masing agama di Bukittinggi, para pemuka agama memiliki peranan yang cukup penting dalam menciptakan suasana yang kondusif di Bukittinggi berkaitan dengan kehidupan keagamaan.

3. Badan/Organisasi Keagamaan.

Di Bukittinggi terdapat banyak organisasi keagamaan yang bergerak dalam ranah pendidikan, dakwah dan kegiatan sosial. Beberapa organisasi tersebut di antaranya:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi
2. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bukittinggi
3. Muhammadiyah Kota Bukittinggi
4. Nahdatul Ulama (NU) Kota Bukittinggi
5. Aisyiah Muhammadiyah Kota Bukittinggi
6. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kota Bukittinggi
7. Panitia Hari-hari Besar Islam (PBHI) Kota Bukittinggi
8. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Padang
9. Badan Koordinasi KBIH Kota Bukittinggi
10. Pemuda Tarbiyah Islamiyah (PTI) Kota Bukittinggi
11. Badan Kontak Remaja Masjid (BKRM) Kota Bukittinggi
12. Lembaga Didikan Subuh (LDS) Kota Bukittinggi
13. Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Bukittinggi
14. Majelis Ta'lim Kota Bukittinggi
15. Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Kota Bukittinggi
16. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bukittinggi

17. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Bukittinggi
18. Ikatan Remaja Muhammadiyah Kota Bukittinggi
19. Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Bukittinggi
20. Himpunan Dai dan Mubaligh Kota Bukittinggi
21. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Kota Bukittinggi

BAB IV

POLA KERUKUNAN DAN KETIDAK RUKUNAN MASYARAKAT BUKITTINGGI

A. Deskripsi Pola Kerukunan Dan Ketidak Rukunan Masyarakat Bukittinggi

1. Potensi Konflik Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi

Adanya pluralitas dalam masyarakat merupakan realitas yang terwujud dalam bentuk perbedaan secara kodrati dalam kehidupan sosial. Pluralitas yang terdapat dalam proses kehidupan masyarakat kita terdiri atas dua bentuk, yakni pluralitas horizontal dan pluralitas vertikal. Pluralitas horizontal misalnya perbedaan etnis, ras, dan agama. Sedangkan pluralitas vertikal misalnya perbedaan peran antara pemerintah dan rakyat, perbedaan tingkat pendidikan, serta perbedaan ekonomi.

Dalam skala tertentu, pluralitas masyarakat dapat dipandang sebagai aset kekayaan bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi timbulnya persaingan secara sehat. Namun dalam keadaan yang berbeda, pluralitas tidak hanya dipandang sebagai perbedaan belaka, tetapi juga sebagai pertentangan atau konflik. Tantangan yang dihadapi masyarakat adalah bukan menghilangkan perbedaan dan pertentangan, melainkan

bagaimana mengelola secara kreatif sehingga terwujud dalam *cooperation* dan *competition* (Effendi, Djohan, 1999): Konflik merupakan suatu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai atau norma-norma yang berlaku (Soekanto, 1983; 60). Selanjutnya konflik sosial bertujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan terhadap status kekuasaannya kelangkaan sumber daya, dimana konflik kelompok tidak hanya untuk memperoleh nilai-nilai yang diinginkan terjadi juga untuk menetralkan, melukai dan melenyapkan lawan-lawan mereka. Konflik tidak hanya terjadi antara individu dengan individu dan lainnya, individu dengan kelompok, konflik dalam kelompok maupun antar kelompok. Konflik inter group sudah inheren dalam kehidupan sosial.

Kemenangan dalam konflik merupakan tujuan yang hendak dicapai, sehingga sasaran dari konflik adalah penghancuran pihak lawan. Kekalahan dan kehancuran pihak lawan sebagai suatu tujuan utama konflik untuk memenangkan keinginan yang akan dicapai, Konflik sosial dalam masyarakat umumnya terwujud dalam kontak fisik atau perang yang biasanya selalu terjadi berulang. Masalah yang timbul akibat terjadinya konflik sosial ini menjadi sangat penting jika mengancam dan menyebabkan rusaknya sistem sosial yang ada.

Walaupun demikian tidak selamanya konflik sosial itu mempunyai potensi yang menyebabkan rusaknya sistem sosial yang

ada, tetapi juga justru membantu terwujudnya integrasi sosial seperti yang diungkapkan Lewis Coser, 1956 (**dalam Achmad Fedyani, 1986: 8-11**), Konflik tidak selamanya bersifat negatif melainkan juga dapat bersifat positif dalam hal membantu mewujudkan rasa persatuan dan kesadaran akan hidup bermasyarakat Beberapa faktor yang penulis temukan di lapangan berkaitan dengan potensi konflik antar umat beragama yang terjadi di Kota Bukittinggi:

a. Pemahaman Keagamaan yang Sempit

Hubungan sosial yang terbentuk antar umat beragama di Bukittinggi pada dasarnya berlangsung baik. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Georg Simmel (**dalam Fedyani, 1986: 8**) bahwa tidak ada suatu kelompok sosial pun yang mampu bertahan dalam integrasi, melainkan pada akhirnya akan terjebak ke dalam suatu konflik, begitu pula sebaliknya.

Kondisi ini sangat memungkinkan terjadi di Bukittinggi, mengingat struktur sosial masyarakat yang memiliki latar etnis, budaya dan agama sehingga memiliki potensi untuk terjadinya konflik. Dari sisi agama tidak dapat dipungkiri ikut berperan dalam memicu ketidak-harmonisan hubungan antar agama, kenyataan ini menunjukkan selain sebagai pemersatu, agama juga dapat menjadi unsur konflik, Sungguhpun demikian sejatinya kita tidak menyalahkan agama, sebab pada dasarnya agama tidak menganjurkan kekerasan, bahkan sebaliknya mengajarkan kebaikan.

Namun pada dasarnya dua unsur itu merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Banyak tokoh agama yang menolak tesis tersebut, dengan berlandaskan dalil-dalil *naql* atau *nash*. Penolakan itu dapat dipahami sebatas ungkapan klise bahwa agama sama sekali tidak mengajarkan konflik, kekerasan atau kerusuhan. Ketika konflik atau benturan itu muncul, hat itu cepat-cepat diklaim sebagai tindakan kriminal dari kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin mencoreng kesucian agama.

Untuk itu pemilahan antara agama dan sang pemeluk agama penting dilakukan. Untuk melihat siapa yang banyak berperan dalam kaitannya dengan konflik antara agama. Jika semua agama mengajarkan kebaikan, maka konflik dan perseteruan bukanlah anjuran agama. Pemeluk agamalah yang kurang memahami agama sehingga agama dijadikan dalih untuk berkonflik. Dengan kata lain, agama sebagai pemicu konflik, bukankah agama dalam tataran kewahyuan (*revelation*) sebagai doktrin, melainkan agama pada tataran pemahaman (*interpretation* dan *understanding*) dan praktek (*living religion*).

Menurut Komaruddin Hidayat {dalam **Chuzaimah Batubara, 2004; 10**} ada tiga alasan yang dapat dikemukakan kenapa pemahaman keagamaan dapat menyebabkan terjadinya konflik. *Pertama* hampir semua agama besar di dunia dilahirkan pada masyarakat tertutup dan langsung berhadapan dengan musuh. Ketika ayat tertentu dipahami hanya secara tekstual dan

tidak melihat konteks sosial dan historis turunnya perintah tersebut, seorang penganut agama akan memandang penganut lain sebagai musuh abadi.

Kedua, jalan keselamatan yang diajarkan oleh semua agama bisa dipahami sebagian penganutnya secara eksklusif sehingga muncul keyakinan bahwa hanya ada satu jalan menuju ke surga dan dengan adanya perintah syi'ar agama kemudian sebagai penganut merasa berkewajiban untuk mengajak seluruh umat manusia mengikuti satu-satunya jalan keselamatan tersebut. Ketika penganut agama lainnya merasa wajib melakukan tindakan yang sama, ini akan menimbulkan ekses negatif: saling mencurigai yang pada gilirannya dapat mengarah kepada benturan-benturan fisik.

Ketiga, setiap agama pada gilirannya melahirkan realitas sosial berupa *the community of believers*. Keberadaan komunitas lain dengan nilai dan keyakinan berbeda dinilai sebagai *out group* atau *outsiders*, saingan yang harus disingkirkan dengan berbagai cara. Masih berkaitan dengan pemahaman keagamaan di atas, keinginan untuk menyiarkan agama yang dianut kepada orang lain sering pula menimbulkan kecurigaan dan konflik. Seperti isu-isu yang terjadi di Bukittinggi yaitu perkawinan beda agama yang selalu dicurigai sebagai upaya kriterisasi. Meskipun pihak Kristen tidak merasa bahwa akan ada upaya pengkristenan umat Islam.

Selanjutnya kecurigaan lain yang muncul seperti yang diungkapkan oleh ketua MUI Bukittinggi Bapak Bachtiar Shabri

(wawancara tanggal 23 Agustus 2005) diantaranya adalah misi dakwah yang dianggap berlebihan, terkadang mereka terlalu bersemangat dalam menyampaikan misi dakwah tanpa mempertimbangkan perasaan penganut agama lain, misi dakwah ini kadangkala ikut menyalakan api pertentangan antar umat beragama.

Namun dari pengamatan di lapangan penyampaian ajaran agama baik Islam maupun Kristen tidak sampai melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap agama lain, tetapi sekedar mengingatkan warga untuk mengantisipasi terhadap misi Kristenisasi sering di lontarkan oleh dai-dai muslim. Karena isu Kristenisasi menjadi kekwatiran bagi masyarakat Bukittinggi.

Disini diperlukan peran yang signifikan dari pemerintah dalam upaya untuk memberikan kesadaran kepada para juru dakwah untuk dapat menyampaikan isi dakwah secara proporsional dan memiliki ketentuan hukum yang dapat mengikat masing-masing dalam proses penyiaran ajaran agama, sehingga ada batas-batas toleransi dalam memberikan isu sentral seputar permasalahan keagamaan.

b. Terbaikannya Sejumlah Norma Agama dan Penggunaan Simbol Agama Sebagai Kepentingan Politik dan Ekonomi.

Adanya beberapa kasus yang berkaitan dengan agama yang coba di buat oleh beberapa pihak tertentu untuk mengacaukan keharmonisan hubungan antar agama di Bukittinggi telah memunculkan gesekan-gesekan konflik yang bermuara pada konflik antar agama.

Di antaranya kasus Injil diselipkan di belakang al-Quran, yang terjadi di Kamang Kabupaten Agam. Menurut Pastor Didik (wawancara tanggal 12 Juli 2005) peristiwa tersebut adalah ulah kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah antara umat Islam dan Kristen. Menurutnya tidak ada usaha terencana dari pihak Kristen untuk melakukan, tetapi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawablah dengan sengaja bermaksud memunculkan ketegangan antara Kristen dan Islam.

Sebenarnya pihak Departemen Agama bisa memberikan klarifikasi semua masalah itu, karena percetakan Al-Qur'an adalah proyek Departemen Agama yang diberikan kepada pihak percetakan untuk diperbanyak. Dengan menelusuri proses dari pemberian tender sampai percetakan serta penyebarannya akan dapat dibuktikan pihak-pihak yang dengan sengaja ingin mengacaukan suasana.

Menurut salah seorang informan dari Kandepag Bukittinggi (wawancara 15/08/05) bahwa beredarnya Al-Qur'an tersebut telah melecehkan umat Islam serta meresahkan masyarakat sehingga perlu pengusutan yang tuntas, mengingat dampaknya kurang baik terhadap masyarakat. Untuk itu Kakandepag Bukittinggi telah melayangkan surat kepada Polri dan Depag RI agar CV yang membuat Al-Qur'an tersebut dapat diproses melalui jalur hukum, karena telah membuat masyarakat resah.

Namun lanjutnya sampai sekarang kasus tersebut belum selesai dan masih menunggu proses selanjutnya, Seperti yang

diungkapkan dalam sebuah wawancara:

"Waktu itu kami kandepag mendukung agar penerbit di Surabaya yang menerbitkan al-Quran berlapis Injil tersebut diproses, walaupun itu unsur ketidak sengajaan/disengaja tetapi itu sudah melecehkan umat Islam, untuk itu kami sudah mengirimkan surat ke kapolres. Disini kami membuat tim untuk mengusut kasus tersebut agar dituntaskan, namun sampai sekarang belum ada kejelasan terhadap kasus tersebut, terakhir kami dengar bahwa CV tersebut sudah ditutup untuk sementara "

Tidak hanya berhenti disitu saja, reaksi keras juga dilontarkan oleh MUI Sumbar dan Tim *Tashih* (peneliti) Al-Qur'an IAIN Bukittinggi untuk mengusut tuntas kasus tersebut yang telah melecehkan tidak hanya umat Islam namun umat Kristiani juga dilecehkan, terutama dengan adanya sejumlah kalimat yang berasal dari kutipan injil sebagai bahan lapisan kulitnya.

Tim *Tashih* IAIN Bukittinggi yang mencoba menginvestigasi Al-Qur'an yang berlapis Injil tersebut menemukan beberapa kejanggalan lain selain dari lapisan Injil dalam Al-Qur'an. Banyak kejanggalan lain yang ditemukan oleh Tim setelah mencoba untuk membandingkan Al-Qur'an tersebut dengan Al-Qur'an Masjidil Haram terbitan Arab Saudi, di antara kejanggalan tersebut meliputi perubahan kalimat, perubahan titik, perubahan *bans*, serta

perubahan tanda *tasdiq* yang tidak ditemukan padanan katanya dalam baris Arab. Seperti dalam surat *Al-An'am* ayat 146, surat *At-Taubat* ayat 111, surat *Hud* ayat 78 dan 116, surat *Maryam* ayat 26, serta surat *Furqan* ayat 2 dan 70.

Menurut Prof. DR. A. Rahman Ritonga, MA, pada sebuah wawancara dalam sebuah koran lokal mengatakan bahwa kesalahan atau keganjilan yang terdapat dalam Al-Qur'an berlapis Injil itu terdapat kesalahan huruf dalam beberapa surat. Pertama, dalam surat *Al-Anam* ayat 146 berupa pemakaian huruf yang seharusnya bertuliskan *ba* pada kalimat *subu mahuma* (lemak dari keduanya) menjadi *Nga* sehingga menjadi *sungu mahuma* (kedamaian atau gabungan keduanya) meskipun kesalahan satu huruf berakibat pada perubahan arti.

Dalam surat *At-Taubah* ayat 111, ditemukan penempatan huruf yang salah. Dalam ayat ini seharusnya ditulis *bibay ngikum* (bergembiralah dengan jual beli yang dilakukan) berubah menjadi *bibaknyikum* (bergembiralah dengan kejahatan yang kamu lakukan). Selanjutnya pada surat *Hud* ayat 78 dan 116 ditemukan kesalahan penempatan titik sehingga berubah huruf seperti dalam kalimat *rasidun* menjadi *rasizun* dan kalimat *uttrifjuun* menjadi *unzifjunn*. Demikian pula dalam surat *Maryam* ayat 26 yang seharusnya bertuliskan *faimma'tarayinna* menjadi *faimmaa nazayinna*.

Surat *al-furqan* ayat 2 dan 70 seharusnya bertuliskan *takaddarahu* menjadi *fakattarahu*, sedangkan dua kata *yubaddilullah*

semestinya ditulis terpisah tetapi dalam ayat tersebut ditemukan disatukan.

Kesalahan tersebut menurut Rahman, lebih banyak bersifat teknis atau percetakan dan belum ditemukan adanya indikasi kesengajaan, sebab dari hasil penelitian Tim *Tasbih* itu tidak menemukan kesalahan yang menjurus kepada penyesatan akidah.

Namun hal tersebut sangat disayangkan karena kesalahan itu terjadi pada kitab suci umat Islam. Sekecil apapun kesalahan itu namun tidak sewajarnya terjadi pada kitab suci. Karena sangat berpengaruh terhadap umat Islam sendiri.

Untuk menetralsir persoalan tersebut diharapkan pemuka agama Islam maupun Kristen untuk bersikap proaktif menuntut pihak penerbit atas kelalaian yang telah menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama. Sebagai umat beragama memang tidak boleh saling melecehkan atau meremehkan satu sama lain dan apabila ada pihak-pihak tertentu yang coba merusak kerukunan antar umat beragama di kota Bukittinggi maka persoalan tersebut harus diusut sampai tuntas melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Disamping itu penggunaan simbol-simbol keagamaan untuk melegitimasi perjuangan politik seringkali memancing emosional massa yang mengarah kepada tindakan negatif sekaligus sentimen pihak lain sebagai lawan politik. Hampir setiap kekuatan politik yang mempergunakan simbol agama dan mengatasi namakan

agama, menimbulkan konflik intern, lebih-lebih konflik eksteren.

Pada agama Kristen, penganut agama secara umum memahami bahwa wadah penyaluran aspirasi politik mereka adalah partai Damai sejahtera (PDS). Akan tetapi pemuka agama dan intelektual agama mereka tidak begitu saja menerima PDS sebagai partai politik. Terutama pengikut Khatolik, tidak mengakui keberadaan PDS karena visi dan misinya tidak sesuai dengan ketentuan keyakinan yang mereka anut, Menurut Didik (Pastor), Partai Damai Sejahtera (PDS) di proklamirkan oleh kelompok sempalan dalam agama Kristen yang mengatasi namakan seluruh umat Kristen.

c. Pendirian Rumah Ibadah

Adanya keinginan penganut agama tertentu untuk mendirikan rumah ibadah di lingkungan yang tidak selayaknya baik secara kultural maupun peraturan pemerintah, menjadi kendala bagi penganut agama lain. Pada dasarnya ketentuan untuk mendirikan rumah ibadah sudah diatur dalam SKB No: 1/1969, pendirian ini juga sangat bergantung kepada banyak atau sedikitnya jama`ah, mengingat sarana ibadah merupakan suatu kebutuhan rohani yang harus dipenuhi, dan pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan di rumah sehingga membutuhkan sarana yaitu rumah ibadah. Namun pembangunan ini juga harus memperhatikan kondisi budaya dan kultur masyarakat setempat.

Kota Bukittinggi dikenal sebagai masyarakat yang taat

beragama khususnya agama Islam, sehingga sangat sulit bagi agama lain untuk mendirikan rumah ibadah di Bukittinggi. Mereka (non muslim) pada dasarnya memiliki keinginan yang kuat untuk mendirikan rumah ibadah namun terkendala.

Menurut ketua MUI Kota Bukittinggi Bachtiar Shabri, keinginan kelompok Kristen untuk mendirikan rumah ibadah sangat besar mengingat populasi mereka cukup banyak 2,6%, sementara rumah ibadah mereka hanya dua buah, yaitu gereja Khatolik dan gereja Protestan. Kedua rumah ibadah ini dibangun jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu di masa pendudukan Belanda di Indonesia. Namun setelah Indonesia merdeka sampai sekarang tidak ada lagi pembangunan gereja.

Pada sekitar tahun 1990-an berawal dari keinginan pengurus agama Kristen untuk mendirikan rumah ibadah, rencana pendirian gereja yang berlokasi di daerah mayoritas Islam, membuat masyarakat setempat tidak dapat menerima, sehingga terjadi penolakan dari masyarakat setempat.

Ketika penulis konfirmasi masalah tersebut ke Kantor Departemen Agama Bukittinggi, ternyata kasus pendirian rumah ibadah Kristen tersebut tidak pernah masuk laporannya secara resmi, dan Kandepag sendiri tidak mengetahui ada rencana pihak Kristen untuk mendirikan rumah ibadah lagi. Isu terhadap pendirian rumah ibadah memang pernah santer terjadi di Kota Bukittinggi, yang berlokasi di daerah By-Pass, namun isu tersebut ternyata tidak terbukti kebenarannya karena bangunan yang

dianggap gereja tersebut adalah toko milik warga Bukittinggi yang kebetulan bangunannya mirip dengan bangunan gaya Eropa, sehingga terkesan seperti sebuah gereja.

Menurut Kabid Penamas Kota Bukittinggi secara keseluruhan kondisi Bukittinggi selama ini tidak ada masalah terhadap pendirian rumah ibadah, hal ini juga dapat dilihat dan kooperatifnya pemuka agama dalam membicarakan persoalan-persoalan umat dalam segala hal. Ini merupakan implikasi dari terbentuk Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Bukittinggi yang terus mengintensifkan jalur komunikasi dan dialog terhadap berbagai masalah yang timbul termasuk pendirian rumah ibadah. Karena memang salah satu fungsi dari FKUB sendiri adalah untuk meminimalisir riak-riak konflik di Bukittinggi. Namun ketika masalah yang dihadapi cukup mendasar maka Kandepag selaku perpanjangan tangan Departemen Agama Pusat di daerah tingkat II harus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang mengurus bidang keagamaan.

Pendirian rumah ibadah menurut salah seorang responden dari Kandepag sudah diatur dalam SKB 2 Menteri 1/1969, dimana ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendirikan rumah ibadah, seperti persoalan yang berkaitan dengan pembangunan gereja telah diatur dalam pasal 4 yang berbunyi;

- 1) Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintah di bawahnya yang dikuasakan untuk itu,

- 2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan:
 - (a) Pendapat kepala perwakilan Departemen Agama setempat
 - (b) Planologi (Perencanaan Pengembangan Wilayah Kota)
 - (c) Kondisi dan keadaan setempat
- 3) Apabila dianggap perlu Kepala Daerah atau Kepala Daerah yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan Ulama/rohaniwan setempat.

Gugatan keras terhadap SKB No. 1/1969 sudah pernah terjadi, dipelopori oleh para pemuka-pemuka Kristen. Hal itu bisa dipahami kelompok minoritas yang menganggap surat keputusan tersebut tidak lagi relevan, diskriminatif, serta alasan-alasan lain seperti isu HAM.

Akan tetapi jikalau kita dekati melalui wawasan kebangsaan, surat keputusan ini masih tetap relevan dengan kondisi saat ini, karena semangatnya adalah untuk mengatur hubungan lintas agama.

Permasalahan yang perlu penanganan yang lebih cepat adalah persoalan pendirian rumah ibadah, mengingat keinginan yang begitu kuat dari pemeluk agama lain untuk mendirikan rumah ibadah selain Islam. Karena tidak dapat mengabaikan keberadaan pemeluk agama lain di Kota Bukittinggi, mereka butuh sarana ibadah sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jamaah.

Disini sangat diperlukan peranan dari Pemerintah Kota Bukittinggi memaknai surat keputusan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam melahirkan peraturan daerah (Perda), dan coba merumuskan secara detail tentang agama dan hubungannya dengan pendirian rumah ibadah. Karena Kota Bukittinggi sebagai kota yang dinilai cukup heterogen baik dari segi etnis maupun agama akan terjadi pertambahan jumlah penduduk baik yang bergama Kristen, Buddha dan lain-lain disamping pemeluk agama Islam.

2. Potensi Kerukunan Antar Umat Beragama

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya, konsekwensi dari interaksi ini menimbulkan dua kemungkinan, baik yang bersifat konflik maupun integrasi (kerukunan). Jhonson (1986: 181-184) yang mengutip pendapat Durkheim menyatakan masyarakat pada dasarnya terbagi dua tipe; pertama tipe masyarakat dengan solidaritas mekanis dan tipe masyarakat solidaritas organis. Jika masyarakat itu terdiri dari tingkat homogenitas yang sangat tinggi dalam kepercayaan, sentimen dan sebagainya, serta pembagian kerja yang sangat minim maka digolongkan pada masyarakat mekanis. Integrasi sosial masyarakat ini dapat dicapai melalui hukum menekan (*represij*), sementara jika masyarakat itu terdiri dari tingkat heterogenitas yang sangat tinggi satu sama lain maka digolongkan pada masyarakat organis. Hukum restitutif yang mempertahankan

dan melindungi saling ketergantungan yang kompleks antar berbagai individu dalam masyarakat ini sangat diperlukan dalam mewujudkan kerukunan.

Kerukunan dalam masyarakat pada dasarnya dapat terwujud jika proses sosial dan tindakan-tindakan sosial dapat saling bekerjasama dalam membangun masyarakat. Karena itu proses-proses sosial mempunyai fungsi-fungsi yang menekankan tujuan untuk terwujudnya kehidupan sosial dan masyarakat yang bercorak keseimbangan atau *equilibrium* di antara unsur-unsurnya, sehingga menghasilkan kerukunan dalam masyarakat, kerukunan dapat terwujud jika masing-masing komponen dalam masyarakat dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan.

Kerukunan umat beragama di Bukittinggi pada dasarnya berjalan dengan baik, ini terlihat dalam kurun beberapa waktu terakhir tidak adanya konflik baik dari agama, budaya, etnis dan lain-lain yang muncul di Bukittinggi. Walaupun pada kenyataannya Bukittinggi dikenal sebagai kota Wisata, Perdagangan serta Pendidikan, yang menambah heterogenitas kota Bukittinggi tidak hanya dalam agama tetapi juga dalam etnis dan budaya, namun riak-riak konflik dapat diatasi.

Kondisi etnis di Bukittinggi sangat baik sehingga tidak ada pertentangan atau pertikaian yang merembes kepada konflik antar agama, mereka hidup damai, walaupun terdapat persoalan-persoalan yang timbul, mereka memiliki suatu wadah yaitu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Bukittinggi yang

mengurusi urusan antar umat beragama. Beberapa pihak pun baik dari beberapa pemuka agama Islam, Khatolik, Protestan maupun Budha tidak mengharapkan terjadinya konflik baik agama maupun etnis, sehingga untuk meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan antar pemeluk agama maka dibentuklah sebuah forum yang mewadahi seluruh organisasi keagamaan yang ada di Kota Bukittinggi.

Ada beberapa hal yang penulis temukan di lapangan berkaitan dengan aktualisasi kerukunan umat yang terjadi di Kota Bukittinggi antara lain;

a. Ajaran Agama yang Luhur

Kehidupan yang rukun dan damai masyarakat Indonesia yang berciri plural menjadi dambaan setiap warga masyarakat. Namun kehidupan rukun dan damai tersebut di beberapa tempat di Indonesia dewasa ini belum dinikmati oleh sebahagian warga bangsa. Sebab masih ada beberapa tempat wilayah negara kita yang terjadi konflik yang bernuansa agama, antar lain di Ambon, Poso. Konflik yang bernuansa agama ini terjadi antara lain karena orang sering menyalahgunakan agama untuk kepentingan tertentu, misalnya demi kekuasaan *dan* politik. Di samping itu orang kurang mendalami agamanya dan kurang memahami agama orang lain sehingga mudah diadu domba.

Dalam kerusuhan yang bernuansa agama itu, banyak orang kemudian mulai mempertanyakan lagi apa sebenarnya fungsi agama. Bukankah agama mengajarkan cinta kasih, kerukunan, dan

persaudaraan sejati? Mengapa justru kerusuhan yang bernuansa agama dapat terjadi dan sering berlangsung sangat lama dan kejam.

Fungsi agama pada dasarnya adalah:

1. Mewartakan keselamatan. Semua agama mewartakan dan menjanjikan keselamatan, bukan bencana. Karena mewartakan dan menjanjikan keselamatan itulah, maka manusia memeluk agama, sebab dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dalam diri setiap manusia terdorong untuk senantiasa mewujudkan kedamaian.
2. Mewartakan arti hidup. Agama-agama memberikan pandangan hidup dan meyakinkan penganut-penganutnya untuk menghayati pandangan hidup itu. Hal ini akan membawa para penganutnya pada kebahagiaan hidup dan keselamatan.
3. Mengajarkan cara hidup. Semua agama mengajarkan kepada penganutnya untuk hidup baik. Hidup beretika dan hidup bermoral. Hidup yang baik akan membahagiakan dan menyelamatkan.

Dilihat dari fungsi-fungsi agama tersebut, sebenarnya sangatlah sulit dipahami bahwa ada kerusuhan dan bencana yang disebabkan oleh agama. Hal itu dapat terjadi hanya kalau agama ditunggangi oleh kepentingan lain atau tidak dipahami. Maka sangat diharapkan supaya semua penganut agama-agama menyadari fungsi agama yang sebenarnya dan berusaha untuk menjalin kerjasama dalam persaudaraan yang sejati, karena cita-cita semua agama sebenarnya sama, yaitu keselamatan manusia.

Sesungguhnya agama mempunyai dua pesan, yaitu masalah ketuhanan dan kemanusiaan. Artinya agama tidak hanya mengandung satu wajah, tetapi banyak wajah. Agama tidak hanya berkuat dan bersibuk diri mentransfusi hubungan transendental manusia dengan penciptanya lewat perilaku ritual ibadah formal. Namun agama harus membumi untuk menegakkan misi kemanusiaan sebagai wadah implementasi dan pedoman moral hubungan antar manusia.

Oleh karena itu agama harus menjadi pilar penegak keadilan, hukum, pemberantasan kemaksiatan, penyokong pendidikan, serta perjuangan kemanusiaan lainnya. Agama sudah semestinya tidak hanya menjadi persoalan langit mengurus hal metafisik. Agama juga harus membumi mengurus persoalan kemanusiaan yang harus diperjuangkan dan ditegakkan misi universalnya.

Di antara agama-agama besar dunia, Islam dan Kristen adalah dua agama yang dipeluk oleh sebahagian besar penduduk dunia. Hubungan antara kedua agama tersebut juga sangat erat. Bersama-sama dengan agama Yahudi, Islam dan Kristen termasuk dalam apa yang sekarang dikenai dengan sebutan agama Ibrahim (*Abrahamic Religions*), karena akar sejarah ketiga agama tadi bertemu pada Nabi Ibrahim.

Apabila diibaratkan manusia, ketiga agama tadi dapat disebut tiga serumpun atau tiga bersaudara dengan agama Yahudi sebagai yang tertua dan Islam yang termuda. Jadi ketiga-

tiganya masih satu keluarga. Tetapi ibarat kehidupan dalam sebuah keluarga, di samping terdapat banyak persamaan dan kerjasama, hubungan antara ketiga agama tadi, terutama antara Islam dan Kristen juga sering memperlihatkan segi-segi negatif.

Di sinilah pentingnya pemilahan antara agama dan pemeluk agama. Jika semua agama mengajarkan kebaikan, maka konflik atau perbenturan sosial tentu bukan ajaran agama, pemeluk agamalah yang kurang memahami agamanya. Pada tataran doktrin Islam, di temukan banyak sekali ayat-ayat al-quran yang membicarakan tentang persaudaraan, kebersamaan dan kerukunan antar berbeda agama. Dalam firman Allah surat *al-Hujurat* ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".

Dalam Al-Quran surat *Al-Kafirun* dijelaskan bahwa "*bagimu agamamu bagiku agamaku*". Ini jelas bahwa dalam Islam sendiri tidak dibenarkan untuk mengganggu kegiatan amalan agama lain, namun ketika mereka (golongan nonmuslim) mencoba untuk

mengusik ketentruman agama Islam maka dalam Al-Quran dijelaskan bahwa "*Allah memerintahkan kamu untuk memerangi orang-orang yang mencoba untuk menghalang-halangi kamu menjalankan ibadah*".

Kita perlu menggarisbawahi bahwa perbedaan suku dan bangsa dimaksudkan oleh Allah sebagai arena saling mengenal dan memahami. Perbedaan suku dan bangsa menimbulkan konsekuensi munculnya perbedaan tradisi, kebudayaan, cara pandang, nilai-nilai. Karena itu perbedaan adalah suatu kekayaan yang tak ternilai harganya.

Islam adalah agama perdamaian, kontribusi Islam untuk perdamaian dunia dan regional, sangatlah besar dalam sejarah umat manusia. Menurut Islam tujuan utama penciptaan manusia adalah saling mengenal dan hidup dalam damai.

Di samping itu, diperlukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-quran dan hadist secara lahiriyah mengharuskan umat Islam untuk bertindak tegas/memusuhi orang-orang non muslim. Mereka harus di perangi sehingga mereka harus meninggalkan ajaran agamanya dan berpaling untuk menuju Islam. Umpamanya; dalam konteks penciptaan kerukunan antar umat beragama dalam bingkai pluralisms harus dilakukan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Quran secara tekstual melegitimasi permusuhan. Misalnya QS: 9: 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah" Ayat tersebut jika dipahami secara tekstual berdampak buruk terhadap masa depan kerukunan antar umat beragama.

Sebenarnya ayat ini tidak berlaku universal, melainkan terkait dengan ruang dan waktu. Kondisi masyarakat Arab tempat ayat ini diturunkan, berada dalam suasana yang terpolarisasi dalam. *Pertama*, kutub kaum beriman yakni orang-orang yang secara teologis beragama Islam dan secara ideologis anti perbudakan serta anti monopoli kekayaan, *Kedua*, Kutub kaum tidak beriman yang secara teologis tidak beragama Islam dan secara teologis pro perbudakan dan monopoli kekayaan.

Kondisi saat itu tidak memungkinkan terciptanya kerukunan, sebab garis perjuangan masing-masing berbeda, bahkan saling berhadapan. Dengan kata lain ayat ini turun dalam kondisi peperangan. Maka dalam konteks kekinian dan kedisinian, dimana kaum beriman dan kaum tidak beriman tidak berada dalam posisi yang saling berhadapan, ayat ini harus disandingkan dan didialogkan dengan ayat-ayat lain yang menganjurkan toleransi, kasih sayang dan tolong menolong antar sesama. Sebab dalam ayat lain Allah berfirman;

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبِلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

"dan jika salah seorang di antara kaum Musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia" (QS: 9: 6).

Berarti sikap umat Islam, tidak selamanya harus memusuhi, merasa tidak senang terhadap non Muslim. Ada saat-saat dimana umat Islam justru harus saling menolong serta menghargai mereka.

Sementara itu umat kristiani mempunyai ajaran kasih sayang sebagai misi yang dibawa oleh Yesus tidak hanya ditujukaan pada umatnya tetapi hendaknya di sebarkan untuk seluruh umat manusia. Seperti yang terdapat di dalam Injil yang mendasari cara bergaul dengan sesama maupun antar umat beragama, dimana ada sabda yang mengatakan bahwa "*Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh akal budimu, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasibi dirimu sendiri*". Dari kutipan tersebut terkandung nilai bahwa sesama manusia tidak pandang latar belakang agama, suku dan lain-lain mereka itu adalah ciptaan Tuhan yang perlu dikasahi. Sidang agung Gereja Khatolik Indonesia (SAGKI) tahun 2000 mengamanatkan kata kunci "komunitas Basis" sebagai cara baru menggereja. Jajaran Komisi PSE yang mempersiapkan gerakan APP secara tahunan menyepakati salah satu unsur pokok dalam komunitas basis ialah persaudaraan sejati. Hidup menggereja sebagai salah satu proses bertumbuh bersama dalam kasih persaudaraan diolah sebagai tema besar dan menjadi perenungan selama beberapa tahun terutama pada masa pra paskah. Pada tahun 2002 dipilih sub tema: "Rekonsiliasi" berdasarkan situasi semasa keterpurukan yang ditandai dengan kerusuhan dan penghancuran hasil-hasil yang telah dibangun dengan susah payah.

Dalam keadaan seperti ini, betapa pentingnya membangun hati yang damai dengan diri sendiri, sesama dan Tuhan. Betapa pentingnya menjadi penganjur perdamaian di tengah hidup masyarakat.

Pada tahun 2003 dipilih sub tema "Toleransi" berdasarkan situasi semasa yang ditandai dengan semakin tajamnya perbedaan, pertentangan bahkan permusuhan. Dalam keadaan seperti ini, penerimaan dan pemahaman tentang perbedaan menjadi syarat mutlak hidup dalam keanekaragaman, suatu perjuangan membuka sekat-sekat pembatas.

Pada tahun 2004 dipilih sub tema "Mengolah Konflik". Istilah serasi apa untuk suatu tindakan tepat terhadap konflik? Ada resolusi, transformasi. Keduanya dikenal lazim tapi apa dipahami umat sederhana? Ada kata lain lagi; mengatasi, tetapi apakah memang konflik bisa dihilangkan? Ada lagi kata mengelola, tapi apa itu tidak memuat rekayasa yang bahkan memeralat konflik untuk suatu tujuan tertentu?

Mengelola konflik diangkat sebagai pokok perenungan tatkala situasi perbedaan dan pertentangan serta kekerasan membawa korban yang senantiasa tergelar lewat pemberitaan. Pokok perenungan APP tahun 2004 adalah bagaimana lewat persaudaraan sejati kepentingan lebih banyak orang dan lebih luhur diperjuangkan? Proses pengenalan dan pengambilan sikap di tengah konflik memuat suatu undangan untuk membaca dan mencermati kehidupan dalam hubungan-hubungan bam, "*to be new*

us",.

Begitupun pada agama Buddha, terdapat nilai-nilai mulia yang menghendaki pemeluknya agar bersikap toleransi, pluralis dan tidak eksklusif, di antaranya:

- Melindungi kebenaran tanpa memonopoli dan memutlakan (M. II.171)
- Objektif, menghargai perbedaan pendapat dan kritik berdasarkan fakta (D. I, 3)
- Tidak mempertentangkan opini (A. I, 66)
- Menghargai guru/agama, seperti pada kasus jenderal Siha (Vin. I, 236-237), Upali (M. I, 378)
- Hidup berdampingan, tidak mengganggu/mengancam budaya yang sudah mulia.

Penganut Buddha diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang telah ditetapkan kebenarannya secara universal, serta melindungi kebenaran dan menghargai kebenaran-kebenaran pihak lain. Tidak ada yang berhak mengklaim bahwa kebenaran itu hanyalah milik suatu pemeluk agama atau etnis tertentu.

Buddha juga memerintahkan pada pemeluknya untuk bersikap inklusif, terbuka untuk berdialog dengan agama-agama yang ada. Sebaliknya Buddha sangat melarang pengikutnya berperilaku eksklusif baik secara intern -memahami doktrin agama secara sempit- maupun terhadap ajaran-ajaran agama yang berbeda –tidak menghargai perbedaan, tidak mau bekerjasama

dengan orang lain serta merasa paling super dan paling benar di antara pemeluk-pemeluk agama yang ada.

Oleh sebab itu, hakikatnya setiap agama melarang pemeluknya melakukan perbuatan saling menghina, meremehkan serta menganggap rendah individu atau kelompok lain yang tidak berprilaku manusiawi. Dengan demikian, hidup rukun dan harmonis sesungguhnya merupakan bahagian ajaran agama serta dambaan seluruh umat beragama.

b. Budaya Pluralitas

Persoalan pluralisme memang layak diperdebatkan, baik pluralisme dalam tataran konseptual teoritis maupun pluralisme dalam tataran praktis atau kenyataan hidup umat beragama. Sebelum fatwa MUI keluar soal ini, wacana pluralisme sebetulnya sudah tumbuh seiring dengan merebaknya pemikiran liberalisme di Indonesia tahun 70-an. Nurcholis Madjid waktu itu yang menjadi ikon intelektualnya.

Perdebatan soal paham pluralisme masih terus menghangat, setidaknya, selama beberapa hari ke belakang, banyak media menyajikan tema soal pluralisme di rubrik opini-nya. Perdebatan yang dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan haramnya paham pluralisme, sekularisme, dan Liberalisme itu, memang berpotensi terus menghangat sebagai diskursus publik. Silang pendapat para pemikir keagamaan dalam tataran teoritis konseptual di satu sisi, dan pada tataran praktis, publik juga merespon

dengan nada yang berbeda, di sisi lain.

Secara sederhana, pluralisme dapat dimaknai sebagai sebuah keragaman, sedangkan sikap dan pandangan yang positif terhadap keragaman tersebut adalah pluralisme. Pemisahan pluralitas dan pluralisme seperti keragaman tanpa aturan yang akan saling berbenturan dan mencabik-cabik keragaman itu. Keragaman tanpa ritme dan komposisi, akan menjadi nada sumbang dan tidak didengar. Oleh karena itu pluralismelah yang menyusun keragaman itu menjadi alunan nada yang merdu. Bila pluralitas adalah tangga-tangga nada, maka pluralisme adalah komposisinya.

Keragaman juga harus diletakkan pada prinsip sama rata; duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sikap dan pandangan superioritas satu ragam terhadap keragaman yang lain, tidak akan bisa meringkai keragaman itu menjadi susunan gambar yang apik. Oleh karena itu pluralitas memerlukan kesetaraan dan persamaan. Dalam hal ini toleransi tidaklah cukup merawat keragaman tersebut. Apalagi jika toleransi secara pasif; tenggang rasa si kuat pada si lemah; kelompok mayoritas pada kelompok minoritas. Untuk itu kata dialog lebih mumpuni; agar kutub-kutub beragam itu saling mengenal, belajar dan menghargai perbedaan.

Pengakuan pluralitas agama dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip keterbukaan-suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas

masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius.

Tradisi berbeda pendapat di kalangan umat, bila dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Dengan tradisi perbedaan pendapat, kita menjadi tidak mudah untuk merasa paling benar sendiri. Pada tradisi perbedaan pendapat yang berujung pada dialog, ada nuansa saling kritik atas kelemahan masing-masing guna memperbaiki di kemudian hari. Sayangnya perbedaan pendapat dan penyikapan terhadap fatwa MUI belakangan cenderung sepi dari dialog yang produktif dan kondusif. Bahkan ada sekelompok orang yang dengan mengatasnamakan kebenaran dan kehendak Tuhan, menyerang kelompok lain yang dianggap menyimpang dengan dalih pelurusan akidah dan ibadah.

Dengan otoritas dan jumlah ulama yang terhimpun di dalamnya, sebetulnya MUI diharapkan menjadi penengah dari berbagai corak pemikiran yang saat ini berkembang. Sayangnya harapan itu malah terjadi terbalik dengan pembelaan MUI terhadap sekelompok orang dan penghakiman MUI terhadap sebagian lainnya.

Pada dasarnya, pluralisme adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok, suku, warna kulit dan agama saja. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa saling belajar, bergaul dan membantu santara satu dan lainnya. Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah realitas yang pasti ada di mana saja, justru dengan pluralisme itu akan tergali berbagai komitmen bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui

kepentingan kelompok dan agamanya. Kepentingan itu antara lain adalah perjuangan keadilan, kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan pendidikan. Maka pendefenisian pluralisme sebagai sebuah relativisme adalah sebuah kesalahan yang fatal. Sebab, pluralisme sendiri mengakui adanya tradisi iman dan keberagaman yang berbeda antar satu agama dengan agama lainnya.

Realitas pluralitas yang mendorong ke arah kerja sama dan keterbukaan itu, secara jelas telah diserukan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 14: Dalam ayat itu, tercermin bahwa pluralitas adalah sebuah kebijakan Tuhan agar manusia saling mengenal dan membuka diri untuk bekerja sama.

Dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 213 juga disebutkan:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أوتوه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Manusia itu adalah satu umat. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan beserta mereka Ia turunkan kitab-kitab dengan benar, supaya Dia bisa memberi keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dalam ayat itu muncul tiga fakta: kesatuan umat di bawah satu Tuhan; kekhususan agama-agama yang dibawa oleh para Nabi; dan peranan wahyu (kitab suci) dalam mendamaikan perbedaan

di antara umat berbagai agama. Ketiganya adalah konsep fundamental al-Quran tentang pluralisme agama. Di satu sisi konsepsi itu tidak mengingkari kekhususan berbagai agama, di sisi lain, konsepsi itu juga menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia dan kebutuhan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antar umat beragama.

Pada masa lalu, semua agama pasti pernah mengalami penderitaan dan konflik. Hal itu bisa jadi diakibatkan oleh kebijakan yang diskriminatif oleh penguasa atau karena perlakuan agama lain yang lebih mayoritas. Oleh karenanya, hampir semua agama memberikan perhatian yang lebih terhadap hak-hak dasar kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan dan kebebasan politik.

Ketiga hal itu merupakan pilar dari penegakan dan perjuangan demokrasi. Kebebasan individu untuk beragama, hanya bisa diwujudkan dalam sistem yang demokratis. Maka, hak-hak asasi manusia tentang adanya jaminan beribadah secara bebas dan menyebarkan agamanya harus senantiasa di kembangkan. Jangan sampai sebuah agama atau sekelompok tertentu dalam intern agama memaksa dan menggunakan kekerasan guna menghegemoni dakwah untuk kelompok sendiri.

Oleh sebab itu khususnya masyarakat Kota Bukittinggi dan Sumatera Barat umumnya, karena tergolong kepada masyarakat yang heterogen, untuk selalu mengembangkan budaya pluralitas/sikap mengakui adanya perbedaan sekaligus memupuk perasaan untuk

saling menghormati. Dengan demikian keragaman yang merupakan sebuah kemestian dalam masyarakat, dapat dipotensikan menjadi suatu kekuatan, di samping dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan sejahtera.

c. Nasionalisme

Nilai-nilai nasionalisme dalam masyarakat pada dasarnya juga dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai nasionalisme yang dimiliki oleh setiap masyarakat bisa meredam konflik dan merelatifkan perbedaan golongan sosial sehingga tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang berintegrasi. Munculnya rasa nasionalisme yang pada dasarnya dapat mengikat elemen-elemen yang berbeda dalam masyarakat Bukittinggi yang cukup heterogen baik dari etnis maupun agama.

Biasanya nilai-nilai nasionalisme muncul pada perayaan hari-hari besar nasional seperti hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kondisi ini mampu menciptakan semangat kebangsaan yang berperan sebagai perekat sosial (*societal glue*), sehingga mampu menyatukan masyarakat di atas perbedaan golongan sosial yang ada dalam masyarakat.

Nilai-nilai nasionalisme juga mampu mengkomudasi kepentingan-kepentingan kelompok sosial masyarakat baik dari segi etnis maupun agama, sehingga mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama yang diterjemahkan melalui keikutsertaan dalam memeriahkan hari-hari besar nasional.

Dari beberapa informan yang penulis wawancarai, mereka

mengungkapkan bahwa pada perayaan hari nasional tersebut mereka merayakan secara bersama-sama dan dalam unsur kepanitian pun mereka tidak saling membeda-bedakan atas etnis maupun agama, sehingga mereka saling bahu-membahu untuk menyukseskan acara tersebut. Beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat Bukittinggi untuk melestarikan hubungan antara umat beragama. Hubungan ini dapat dilihat melalui kegiatan kemasyarakatan.

Kegiatan sosial merupakan salah satu wahana yang efektif dan efisien untuk mempertahankan hubungan yang baik antar semua pemeluk agama. Dalam kegiatan ini semua anggota masyarakat bergabung untuk menjadi satu menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan yang mereka hadapi bersama.

Kegiatan yang dilakukan seperti manunggal sakato yang dikoordinir oleh masing-masing kelurahan. Kegiatan ini melibatkan seluruh unsur di kelurahan tersebut, mereka membaur untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial seperti membersihkan lingkungan sekitar dengan membersihkan jalan, selokan, rumah ibadah dan lain-lain. Biasanya mereka yang tidak hadir dalam manunggal sakato akan dikenakan sanksi dengan membayar denda, ini merupakan konsekwensi dari ketidak hadiran mereka.

Menurut salah seorang informan warga keturunan Paulina (tokoh agama Buddha) menyatakan bahwa mereka sering melakukan kegiatan manunggal sakato di lingkungan sekitar, karena bisa membaur dengan masyarakat sekitar, ketimbang

membayar denda, karena Paulina menganggap bahwa kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya untuk mempererat tali silaturahmi antar warga.

Beberapa keuntungan yang diperoleh ketika mereka melakukan kegiatan sosial antara lain mereka dapat bertemu muka secara langsung sehingga ketegangan dan kekakuan yang mungkin terjadi di masyarakat bisa cair. Selanjutnya mereka dapat berkomunikasi sehingga gagasan, pendapat dan masukan dapat disampaikan dan masalah-masalah yang dihadapi dapat dibicarakan bersama mengatasi kesalahpahaman.

Kecenderungan selama ini yang dilihat bahwa warga keturunan dinilai kurang membaaur, mereka lebih suka membayar denda ketimbang melakukan kegiatan, kecenderungan selama ini coba dihilangkan sehingga tidak muncul anggapan-anggapan yang kurang baik terhadap warga keturunan.

Sehingga keberadaan etnis keturunan (China/Tionghoa) di Bukittinggi saat ini cukup mendapat simpatik dari warga sekitar dan telah diakui sebagai penduduk pribumi seperti etnis-etnis lainnya. Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengakui keberadaan etnis ini sehingga masyarakat yang berasal dari etnis China dimanfaatkan demi kepentingan sepihak. Mereka diperas dan dipaksa untuk membayar iyuran-iyuran yang berbeda dengan masyarakat pribumi, Bahkan tahun 1997-1998 etnis China di Bukittinggi di paksa harus menyumbangkan diri karena takut di teror.

B. TRANSFORMASI SOSIAL

1. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Bukittinggi

Hidup berdampingan antar warga masyarakat yang memiliki latar belakang suku, etnis maupun agama merupakan suatu hal yang tak dapat dielakan namun mereka juga harus menyadari bahwa mereka harus mampu saling menghormati, menghargai serta tidak menciptakan permusuhan. Dalam soal amalan masing-masing pemeluk agama harus mengamalkannya dengan sungguh-sungguh tanpa mengganggu pelaksanaan kegiatan agama lain. Munculnya gejala-gejala yang memicu terjadinya konflik antar umat beragama menurut ketua MUI Bukittinggi Bachtiar Shabri memang ada pada masa lalu, seperti pelaksanaan misi dakwah yang berlebihan dari pemuka agama lain, yang bermuara pada keinginan untuk menarik pemeluk agama lain untuk masuk ke dalam agama mereka. Karena gejala itu munculah tantangan sehingga terjadi sedikit perdebatan. Kondisi ini lanjut Bachtiar ada kaitannya dengan kriterisasi. Indikasi adanya Kristenisasi di Bukittinggi memang belum menjadi isu sentral di Bukittinggi karena segala permasalahan keagamaan yang mencuat kepermukaan dapat dibendung dengan adanya forum antar umat beragama. FKUB terdiri dari seluruh organisasi Islam dan Kristen, Buddha maupun Hindu.

Senada dengan Bachtiar Shabri, ketua FKUB Bukittinggi Salman menyatakan bahwa untuk mendiskusikan dan

membicarakan berbagai persoalan keagamaan perlunya dibentuk sebuah forum, sekaligus sebagaiantisipasi terhadap munculnya konflik agama pada masyarakat Bukittinggi, untuk itu dibentuklah sebuah forum kerukunan yang diberi nama Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Bukittinggi yang disingkat dengan FKUB.

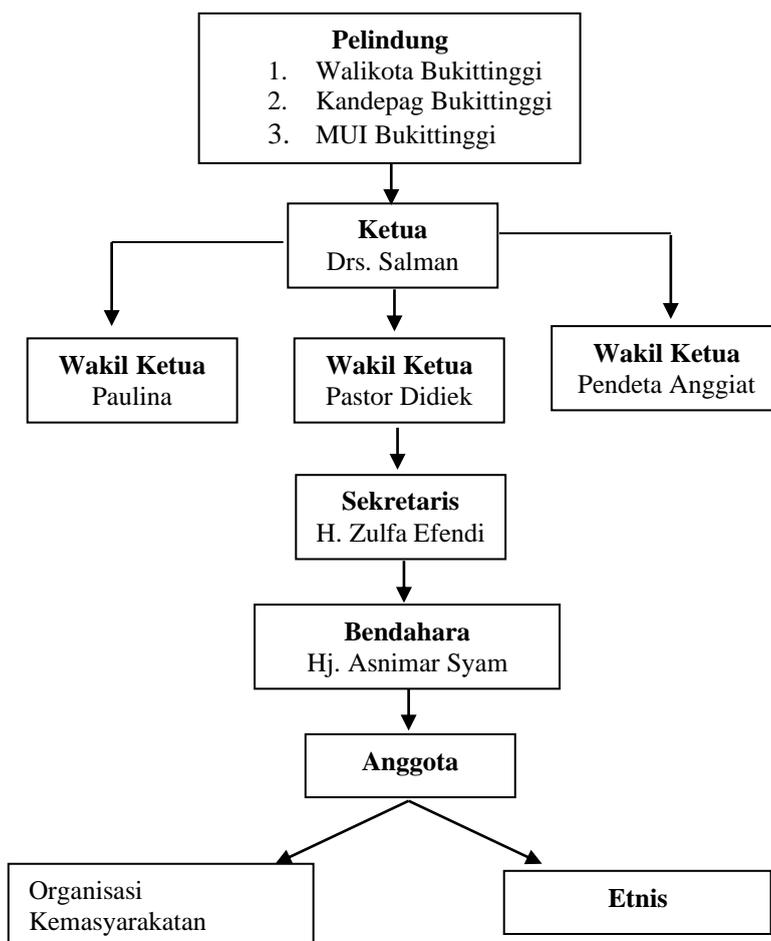
Forum komunikasi ini digagas semenjak tahun 1995. Keberadaan forum Komunikasi diakui secara formal dengan dikeluarkannya SK Wali Kota Bukittinggi. Artinya bahwa forum komunikasi antara umat beragama merupakan lembaga resmi, yang dibina langsung oleh Wali Kota dan Muspida.

Beberapa faktor yang memotivasi berdirinya forum komunikasi antar umat beragama (FKUB) Kota Bukittinggi adalah:

1. Kenyataan objektif masyarakat Kota Bukittinggi yang terdiri dari berbagai macam penganut agama dan etnis, di samping Muslim sebagai masyarakat dominan, juga terdapat penganut agama Kristen Protestan, Katholik, Buddha serta Hindu,
2. Terputusnya komunikasi antar umat beragama, sehingga seringkali terjadi mis komunikasi. Terputusnya komunikasi menyebabkan timbulnya prasangka-prasangka di antara umat beragama yang tidak didukung oleh fakta-fakta; Membuka peluang-peluang bagi orang-orang yang ingin menimbulkan terjadinya konflik

Forum Komunikasi tersebut memiliki struktur baku yang terdiri dari Ketua, dan wakil-wakil ketua diambil dari perwakilan-perwakilan agama, perwakilan organisasi masyarakat, perwakilan etnis-etnis yang ada, Secara struktural susunan kepemimpinan dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama adalah: Ketua, Wakil Ketua berasal dari pemuka-pemuka Agama. Jalur koordinasinya dengan Majelis Ulama Indonesia Bukittinggi adalah salah satu seksi/bagian hubungan antar umat beragama sekaligus sebagai ketua Forum Komunikasi. Artinya Forum Komunikasi merupakan implementasi kerja MUI. Di dalam Forum Komunikasi Ketua MUI berfungsi sebagai pelindung, di samping organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Tarbiyah, Dewan Dakwah Islamiyah dan lain sebagainya.

Struktur Kepengurusan FKUB



Salah satu program yang dilaksanakan adalah mengadakan pertemuan antara semua pihak (pemeluk agama serta etnis) setiap bulan untuk mengkomunikasikan segala persoalan. Ketika suatu kondisi sangat memungkinkan terjadi konflik antar umat beragama atau antar suku, maka pelaksana harian forum langsung

mengontak komponen-komponen terkait untuk mengadakan pertemuan sekaligus membicarakan serta mencari solusi terbaik menghindari dampak negatif yang lebih buruk.

Misalnya terjadi peristiwa pemboman gereja beberapa wilayah Indonesia, atau kejadian Mesjid Istiqlal. Hal ini bisa menjadi pemicu bagi daerah-daerah lain dimana terdapat orang-orang yang tidak menginginkan adanya harmonisasi antar pemeluk agama atau etnis. Karena ada kemungkinan bahwa pelaku pemboman atau perusakan tersebut hanya satu orang. Awalnya dia bom gereja, kemudian dalam waktu yang tidak berselang lama dia bom lagi masjid, sehingga terkesan pembalasan umat Kristen terhadap perlakuan umat Main. Akhirnya tentu akan berwujud permusuhan antar Islam dan Kristen.

"Hal semacam ini kita komunikasikan kepada semua pemeluk agama dan etnis bahwa persoalan tersebut bukanlah isu agama, tetapi ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab secara sengaja menginginkan terjadinya ketidaktentraman di masyarakat Contoh lain kasus -wawah seorang pelajar di Kota Padang yang berhasil diKristenkan oleh misionaris yang sempat menghebohkan ulama dan masyarakat Sumaiera Barat. Hal tersebut kita bicarakan pada forum Komunikasi untuk memperoleh informasi sekaligus klarifikasi kepada pendeta-pendeta dan pastur. Diperoleh penjelasan bahwa hal tersebut merupakan ulah dart kelompok-kelompok

sempalan dari pengikut agama Kristen Protestan. Sama halnya dalam Islam terdapat kelompok-kelompok radikal yang seringkali bertindak di luar kontrol pemerintah, ulama dan masyarakat secara umum "

Untuk mengatasi hal-hal seperti ini, Forum Komunikasi juga berusaha sebagai mediator antara pemeluk agama dengan aparat pemerintah. Misalnya mendatangkan narasumber dari Kodim, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan lain-lain. Sosialisasi peraturan-peraturan daerah serta menumbuhkan kesadaran umat beragama secara internal serta antar umat beragama. Forum Komunikasi antar umat beragama berfungsi mengkomunikasikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Sementara berkaitan dengan masalah ibadah dipersilahkan kepada pemeluk agama masing-masing. Artinya setiap pemeluk agama diberikan kebebasan menjalankan ajaran agamanya, asal tidak mengganggu kekhusukan atau ketenteraman pemeluk agama lain, Istilah ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Bukittinggi "*silahkan pupuk tanaman kita masing-masing, dan jangan mengganggu tanaman orang lain"*

Forum ini juga membicarakan dan mendiskusikan berbagai persoalan keagamaan yang tengah berkembang. Tidak diizinkan di antara pemuka agama untuk mengembargemburkan ketidaksenangan terhadap suatu agama atau etnis di luar forum. Karena hal itu berarti memermalukan kelompok agama lain atau etnis lain dihadapan umum. Kenyataan ini juga

berakibat negatif terhadap hubungan beberapa dan bernegara.

Menurut Ketua Forum Komunikasi, ketika mereka (yang berbeda agama) melakukan acara-acara keagamaan mereka selalu mengundang ketua forum, malah mereka menyalurkan bantuan seperti beasiswa untuk keluarga/masyarakat miskin. Cuma ada juga masyarakat dalam yang tidak mau menerima, karena merasa terhina dengan bantuan orang lain agama, Padahal sebenarnya umat Islam tidak dilarang untuk memanfaatkan bantuan-bantuan semacam itu, asal tidak akan merubah aqidah atau kepercayaan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempererat talisilaturahmi antar tokoh agama adalah dengan mengadakan "*malam kemesraan*" makan bersama antara pemuka-pemuka agama dengan Kandepag dan pemerintah daerah. Pada pertemuan tersebut semua pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah mengenai kebutuhan-kebutuhan umat beragama.

Berkenaan dengan ini melalui forum komunikasi pemerintah juga akan mengajak pemimpin-pemimpin agama serta seluruh pemeluk agama untuk merancang sebuah metode yang menuntut mereka dapat memperkokoh aqidahnya masing-masing, sehingga dapat menekan sekecil mungkin kelompok sempalan dari pengikut agama yang akan merusak tatanan bermasyarakat.

Menghadapi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2005 di Bukittinggi yang lalu melalui Forum Komunikasi dibuatlah kesepakatan antar umat beragama dalam bentuk selebaran yang ditandatangani seluruh pemuka agama yang ada, organisasi masyarakat dan lain-lain, bahwa dalam pelaksanaan Pilkada dilarang untuk menggunakan simbol agama secara berlebihan. Di samping itu sangat diharapkan kepada masyarakat agama agar menjaga kesatuan dan persatuan intern antar umat beragama.

Disisi lain keberadaan forum komunikasi ini masih menemukan beberapa kendala dalam melaksanakan program-programnya. Walaupun mereka telah memiliki wadah bersama untuk melakukan dialog, akan tetapi belum semua pihak partisipasi dengan penuh kesadaran melibatkan diri dalam organisasi tersebut. Dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah Bukittinggi sangat lemah sehingga banyak program-program seperti pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial keagamaan tidak dilakukan, ini terkait dengan minimnya dana subsidi yang disalurkan oleh Pemenitiah kota Bukittinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Pemuka Kristen Katholik Pastor Didik (wawancara 24 November 2005)

"bahwa masih ada pemuka-pemuka agama merasa keberatan diundang untuk menghadiri pertemuan rutin, begitu juga kelompok-kelompok etnis tertentu seringkali menampakkan ketidakpuasan terhadap keberadaan forum bersama. Di samping itu pihak pemerintah daerah masih

memandang sebelah mata kedudukan forum, sehingga tidak sepenuh halt untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi agama-agama Bukittinggi,, terutama minimnya dana subsidi pembinaan yang disalurkan ".

FKUB kota Bukittinggi sampai saat ini belum memiliki kantor sekretariat sendiri sehingga setiap kali mengadakan pertemuan diadakan di Kantor Depag, rumah tokoh agama dan bahkan sering mengadakan pertemuan di rumah makan, padahal menurut Paulina, dana yang dihabiskan untuk setiap kali pertemuan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain.

Disamping itu karena FKUB tidak memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga tidak ada kejelasan terhadap jangka waktu/periode kepengurusan. Kondisi ini juga akan berakibat tidak transparannya keuangan forum. Paulina berharap agar pemerintah sebagai mediator untuk dapat menyempurnakan struktur lembaga ini.

Ironisnya lagi, departemen Agama Bukittinggi tidak memberikan sumbangan apa-apa terhadap forum antar umat beragama. Idealnya menurut Didik gagasan pengembangan organisasi ini harus muncul dari departemen Agama. Karena pada lembaga Kandepag terdapat satu unit khusus mengurus hubungan berbagai agama yang diakui secara hukum.

Forum Komunikasi Antar Umat Beragama ke depan memiliki tanggung jawab yang cukup berat. Terutama sehubungan dengan santernya wacana kesepakatan Dua Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor T/1969, salah satu tema sentral yang mengemuka tentang pendirian rumah ibadah pemeluk agama di luar Islam.

Hal ini harus diterjemahkan kembali oleh daerah sesuai dengan semangat Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah bersama-sama pemuka-pemuka agama yang ada dalam forum. Akhirnya kebijakan-kebijakan berkenaan hubungan antar umat beragama terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari forum.

2. Perhatian Pemerintah

Kehidupan keagamaan di Kota Bukittinggi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) menjadi perhatian yang cukup serius. Di Bukittinggi terdapat banyak organisasi keagamaan yang bergerak dalam ranah pendidikan, dakwah dan kegiatan social, yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menciptakan iklim kerukunan di kota Bukittinggi. Keberadaan organisasi-organisasi sebagai wadah bagi masyarakat dalam bidang keagamaan, organisasi tersebut antara lain: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Kota Bukittinggi dan lain-lain.

Kondisi objektif masyarakat Kota Bukittinggi yang terdiri dari berbagai masyarakat beragama dan etnis cukup mendapat

perhatian dari pemerintah daerah, walaupun belum memposisikan masing-masing pemeluk agama dan etnis secara proporsional. Akan tetapi pemeluk-pemeluk agama minoritas tetap mendapat perhatian. Misalnya ketika pemeluk agama Kristen membutuhkan tenaga pengajar yang beragama Kristen sebagai pegawai negeri, pemerintah daerah bersama Kandepag merekomendasikan pengangkatan guru agama Kristen ke Kantor Wilayah Departemen Agama. Usaha tersebut berhasil, sehingga untuk Bukittinggi terdapat dua orang guru agama Kristen yang diangkat oleh Departemen agama.

Hal serupa juga pada agama Buddha, ketika pemuka agama Buddha dan pengikut agama Buddha berkeinginan untuk mendatangkan salah seorang guru agama Buddha, pemerintah daerah bersama Kandepag Bukittinggi, merekomendasikan salah seorang pegawai Negeri beragama Buddha yang bertugas di Mentawai untuk dipindah tugaskan ke Bukittinggi. Inipun berhasil dilaksanakan, sehingga siswa-siswa beragama Buddha-pun memiliki satu guru agama. Pada hal sebenarnya kalau dilihat dari segi jumlah siswa yang akan diberikan ilmu agama Buddha belum memenuhi standar.

Kondisi ini merupakan wujud dari keseriusan pemerintah kota untuk menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama, dan sekaligus mewujudkan kehidupan keagamaan yang berlandaskan iman dan taqwa, serta meningkatkan kualitas SDM yang profesional, yang memiliki ilmu pengetahuan dan moral yang

ludur. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung, sehingga tidak terjadi kecurigaan-kecurigaan yang mengarah kepada munculnya konflik.

3. Pendidikan Berbasis Aqidah

Salah satu aspek yang paling menonjol untuk diperhatikan mengapa konflik sering terjadi adalah kurang efektifnya pendidikan agama di sekolah. Dari hasil kajian berbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis moral dan akhlak.

Sebagai kota budaya dan wisata, Bukittinggi tidak dapat dilepaskan dari arus wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri, ini merupakan konsekwensi dari keramaian, sehingga banyaknya terjadi tindak kriminal dan perbuatan maksiat. Modernisasi dan globalisasi ikut andil memperparah keadaan.

Terjadinya pendangkalan agama dan moral bagi generasi muda Bukittinggi merupakan hal cukup memprihatinkan, bahkan terjadinya tingkat kriminal seperti pembunuhan, perkelahian terkesan seperti hal biasa. Perbuatan amoralpun seolah-olah dianggap sesuatu kejadian bersifat sepele. Kondisi ini dapat di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga menjalar terjadinya konflik antar agama.

Tidak efektifnya pendidikan agama di sekolah formal di Indonesia, dinilai oleh banyak pihak telah gagal dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan dan beradab,

empati dan simpati dan menolong kaum lemah cenderung terabaikan. Ini semua merupakan bagian dari bentuk kegagalan pendidikan agama. Selain itu, konflik SARA yang terjadi akhir-akhir ini merupakan cerminan dari rendahnya sikap toleransi dan kerukunan beragama.

Kegagalan pendidikan agama juga disebabkan oleh praktek pendidikan yang hanya memperhatikan aspek kognitif semata daripada pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama, dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volatif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

Dengan kata lain, pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, dan kurang berorientasi pada bagaimana cara belajar yang benar, akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengalaman, antara gnosis dan praxis dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam praktek pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi agamis (**Muhaimin, 2002**), sehingga terkesan pendidikan agama lebih mengutamakan pengajaran daripada pendidikan moral, padahal intisari sari pendidikan agama adalah pendidikan moral.

Untuk menemukan model pembelajaran yang meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama dan mengembangkan model pendidikan agama maka pemerintah kota Bukittinggi melaksanakan sebuah program yang diberi nama Pendidikan Berbasis Aqidah dan Pendidikan Aqidah Usia

Dini. Tujuan dari pendidikan berbasis aqidah ini adalah untuk membentuk, mengembangkan dan memantapkan komitmen batin kepada Tuhan melalui pendidikan, perenungan dan pelatihan, sehingga muncul dalam bentuk perilaku yang terpuji. Tujuan ini sesuai dengan visi Kota Bukittinggi yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah yang dijiwai oleh agama dan adat "*syara' mangato adat mamakai*".

Program ini dirancang sedemikian rupa untuk menanamkan aqidah sedini mungkin kepada anak didik. Akidah dan sendi-sendi moral etik mesti ditanamkan sejak usia dini. Karena usia pra-sekolah, pendidikan dasar dan kelanjutan, merupakan masa pertumbuhan, pengenalan lingkungan serta perubahan dari remaja menuju dewasa. Tingkat usia inilah yang mesti dibekali pendidikan akidah secara tepat, sehingga mereka memiliki benteng yang kokoh, yakni iman dan taqwa.

Tugas ini tidak hanya tidak hanya diemban oleh guru-guru agama, akan tetapi merupakan kewajiban semua pihak sesuai dengan profesi masing-masing. Sasaran utama dari pendidikan berbasis aqidah ini adalah tenaga pengajar sebagai prioritas utama, para orang tua, para pelajar dan pegawai se kota Bukittinggi, pemuda-pemudi usia kawin dan ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai.

Dengan landasan moral yang kuat, akan dapat difilter berbagai hal yang dapat menjerumuskan generasi muda pada hal-hal yang negatif, seperti penggunaan narkoba atau zat adiktif

lainnya. Dengan landasan moral itu pula hal-hal yang mengarah kepada munculnya konflik dapat diantisipasi.

Dari data lapangan yang penulis temukan di salah satu sekolah Kristen Xaverius, mereka tidak hanya menanamkan akidah dan keimanan kepada siswa, tetapi mereka memiliki kurikulum hidup yang berhubungan dengan kehidupan umat beragama. Dimana pada pelajaran agama mereka memasukkan materi agama lain seperti ajaran Islam, Hindu, Buddha dan aliran-aliran kepercayaan lainnya. Artinya pemuka agama Kristen telah memberikan bekal pada generasi mudanya terhadap perbandingan agama. Di satu sisi sangat bermanfaat untuk memperkuat akidah dan keimanan mereka, sekaligus akan menambah semangat kebersamaan dan menghargai pemeluk agama lain.

Di samping itu pada mata pelajaran agama juga diberikan materi tentang dialog antar agama yang ada bagaimana seharusnya umat Kristiani bekerjasama dengan pemeluk agama lain di bidang sosial kemasyarakatan, bentuk-bentuk dialog yang harus dilakukan serta batas-batas yang harus dipedomani oleh setiap pemeluk agama. Sehingga model pembelajaran seperti ini mampu menghargai perbedaan pendapat tanpa harus mengorbankan akidah yang diyakini, menghargai diri dan menghargai kebenaran.

Namun kurikulum sama yang berkenaan dengan agama lain yang telah diterapkan oleh sekolah-sekolah Kristen tidak penulis temukan pada lembaga pendidikan Islam, baik

mengenai akidah keimanan, sosial budaya maupun dialog-dialog yang bisa dilakukan dengan agama lain. Menurut hemat penulis hal ini penting dilakukan untuk menghindari kelompok-kelompok dalam agama Islam yang anti terhadap agama lain diluar Islam.

Pengembangan pendidikan berbasis akidah yang dicanangkan oleh pemerintah Bukittinggi tersebut pada level-level tertentu idealnya juga diberikan pemahaman akidah-akidah agama lain, sehingga siswa-siswa muslim bisa memperbandingkan keyakinan yang dianutnya dengan keyakinan agama lain, karena cara seperti ini akan memperkuat akidah yang dimilikinya disamping akan menimbulkan sikap saling menghargai.

4. Interaksi Antar Etnis

Layaknya kota pusat perdagangan yang berada di lintas yang menghubungkan beberapa daerah di Sumatera, Bukittinggi menjadi kota penting tujuan dagang masyarakat dari berbagai daerah; seperti, Solok, Batusangkar, Pasaman, Payakumbuh, Padang dan beberapa Kota lain yang mempunyai kepentingan ekonomi. Sehingga Bukittinggi didiami oleh penduduk yang sangat beragam, baik dari segi asal daerah maupun adat istiadat. Bahkan di Bukittinggi kita temukan lokasi yang dihuni oleh satu suku bangsa tertentu, yakni "*Kampung Cino*", didominasi pendatang Cina, India dan Thionghoa yang cukup mapan di bidang ekonomi.

Menariknya bahwa perbedaan daerah dan keberagaman etnis

merupakan kekuatan yang ikut menopang pembangunan Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil mensinergiskan keheterogenan adat istiadat ini menjadi sumber kekayaan daerah. Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat dan etnis untuk berkumpul, membentuk organisasi sebagai wadah silaturahmi sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan.

Karena penduduknya yang heterogen, pemerintahan kota Bukittinggi dalam melahirkan kebijakan selalu melakukan pendekatan kepada seluruh komunitas masyarakat yang ada di kota Bukittinggi. Pendekatan tersebut tidak hanya kepada penduduk asli (orang Kurai) yang meliputi kaum adat, para ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan para pemudanya. Tetapi juga dilakukan kepada komunitas lain yang tergabung dalam berbagai kesatuan masyarakat (Paguyuban), yang terbentuk mengikuti daerah asalnya.

Pemerintah Kota Bukittinggi mewajibkan kepada seluruh paguyuban untuk mendaftarkan diri ke Kesbanglinmas dan dilengkapi struktur kepengurusan dan alamat sekretariat. Hal ini bertujuan memudahkan kerja pemerintah melakukan pengontrolan ataupun komunikasi antara pemerintah dan paguyuban atau antara sesama paguyuban. Di antara paguyuban yang terdaftar pada Kesbanglinmas adalah sebagai berikut:

Daftar Paguyuban Kota Bukittinggi

NO	PAGUYUBAN	KETUA	ALAMAT
1	Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indra Giri Hilir (1PPMI)	Marbawi	Jl. Sudirman, Apotik Saiyo 22980
2	Tujuh Lurah Koto Rantang Sepakat	St. Rajo Amen	Jl. Pintu Kabun No. 12 B
3	Ikatan Paguyuban Marga Batak (IPMB)	A. Turrab	Jl. Bonjo Baru No. 32, 643005
4	Ikatan Keluarga Aceh Taman Syah Kuala	Buchari Yusuf	Praktek Dr. Asrul Nurdin, Simpang Mediense
5	Paguyuban Persatuan Jawa	Parjono, SH	Jl. Komaruddin No. 77 Sapiran
6	Ikatan Keluarga Masyarakat Nias Bukittinggi Sekitarnya {DCMN-BS}	M. Harefa	Jl. Promal No. 2, 640300
7	Ikatan Keluarga Tapanuli Selatan	Prof. Dr. A. Rahman Ritonga, MA	Jl. By Pass Belakang Kantor Camat Bukittinggi Utara
8	Ikatan Keluarga sawahlunto Sijunjung	Darwin, B. Sc, Drs. Assuhatri	Kantor Taspen Bukittinggi, Jl. Prof. Huzairin,
9	Tanah Datar Sepakat	Drs. Yasmien	Bukit Apit/Sekretaris
10	Ikatan Keluarga Tilatang Kamang	Drs. Zulkfli, Yohneva, SH	Bappeda, Rumah Gurun Panjang
11	Matuo Saiyo	Drs. Eri Fauzi/Guru STM.N,	Ipuh Mandiangin

12	Ikatan Keluarga Padang	Yulman Hadi, B.Sc	Jl. Veteran No. 189
13	Perwaliko	Nursal Syam, SH, Suhatri	Jl. Sudirman Balai Prajurit
14	Ikatan Keluarga Pasaman	Iznal Nang	Jl. Lambau Muka SMA1
15	Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPPS)	Amril Amir, SH	Luak Anyir
16	Ikatan Keluarga Banuhampu Sungai Puar	Drs. Dedi Abidin	
17	Ikatan Keluarga Solok	H. Helvi Miaz, SH	Sekolah Kebidanan Belakang Balok
	Ikatan Keluarga Tanjung Raya	H. Harmen	Jl. Syekh Bantam 23366
18	Puja Kusuma	Rubitno	Jl. Guru Hamzah No. 16 Bukittinggi
20	Ikatan Keluarga Solok Selatan	Ir. Zulkarnain	Jl. Prof. Huzairin No. 32
21	Persatuan Daerah Keluarga Pariaman	H. Murdi Dt. MKD. Sati	Jl. Syekh Arrasuli No. 1 22916

Sumber: Kesbanglinmas Bukittinggi

Menurut penulis kenyataan ini ikut menopang kebersamaan dan kerukunan masyarakat Bukittinggi. Masing-masing kelompok mengakui keberadaan masing-masing, di samping itu pemerintah daerah pun memberikan fasilitas yang sama pada setiap paguyuban.

Paguyuban adalah upaya masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan identitas kedaerahan dan adat istiadat masing-masing daerah. Karena Bukittinggi juga termasuk daerah wisata yang didatangi wisatawan manca negara. Jadi

paguyuban hakikatnya bertujuan memagar generasi muda (anak nagari) dari gesekan-gesekan luar yang akan merusak identitas masyarakat Minangkabau.

Kedepan penulis mengharapkan kepada masyarakat daerah untuk lebih mengintensifkan serta selalu memupuk semangat kebersamaan serta pemerintah pun pro aktif dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang beragam. Begitu juga organisasi Paguyuban harus bersifat terbuka terhadap kelompok-kelompok lain dan melengkapi aturan-aturan organisasi. Karena sampai saat ini tidak penulis temukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari organisasi Paguyuban yang ada di Bukittinggi.

C. PANDANGAN DASAR STRATEGIS PEMBINAAN KERUKUNAN

Kita harus jujur, bahwa masih ada umat masing-masing agama yang belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan mereka dengan baik. Di samping itu, banyak di antara umat beragama yang menginterpretasikan ajaran maupun akidah agama mereka secara dangkal dan sempit. Sebaliknya kita juga harus jujur bahwa masih ada tokoh-tokoh agama yang salah dalam penyampaian pesan-pesan keagamaan. Sehingga banyak kemungkinan terjadi *miss informasi* (kesalahan informasi) tentang ajaran agama. Namun akumulasi dari miss informasi tadi sampai pada titik kulminasinya dapat menimbulkan ekses yang cukup dalam.

Selain itu kita seharusnya mengakui bahwa masih ada segelintir pemuka agama yang berbeda pendapat dan sebagainya sehingga menimbulkan perasaan sentimen yang pada awalnya sangat pribadi kemudian menjadi masalah agama.

Kenyataan lain tidak hanya pemuka agama, pengikut masing-masing agama juga memiliki sikap sentimen terhadap pengikut agama lain. Apalagi saat-saat terakhir tumbuh subur kelompok sempalan yang seringkali bertindak di luar batas-batas kemanusiaan.

Untuk itu mungkin sudah saatnya kita semua, diawali oleh para cendekiawan agama-agama untuk meletakkan segala permasalahan secara proporsional dan mengutamakan kehidupan bermasyarakat, mengedepankan sikap terbuka terhadap heterogenitas masyarakat Indonesia.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya konflik

- a. Usaha-usaha menghindari kerusuhan;
 - Diupayakan supaya agama tidak diperalat demi kepentingan politik ekonomi
 - Menjauhkan diri dari sikap provokasi yang muncul dari fanatisme buta
 - Menjaga supaya tidak terjadi pencemaran terhadap simbol-simbol agama manapun

b. Usaha-usaha positif mengadakan dialog dan kerja sama

Belum efektifnya penyelesaian konflik antar agama atau konflik social lainnya disebabkan karena adanya eksklusivitas, saling berpransangka dan tidak adanya keadilan. Biasanya ini terjadi pada masyarakat bawah yang kental warna keagamaan dan kesukuanya. Sementara kalangan bawah inilah sebetulnya yang paling banyak dan rasa fanatisnya masih murni. Wacana dialog yang mulai tumbuh bagus dikalangan atas, sudah saatnya di transformasi pada rakyat bawah dapat dilakukan dengan beberapa bentuk dialog.

Ada beberapa bentuk dialog yang dapat dikembangkan antar umat beragama;

1. ***Dialog Kehidupan***, Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dengan sesamanya yang beragama lain, dari suku lain, bahkan dari aliran atau paham politik yang berbeda dalam suatu lingkungan atau komunitas. Dalam kebersamaan itu manusia berusaha untuk bertegur sapa, bergaul, saling mendukung dan saling membantu antara satu dengan yang lain.
2. ***Dialog Karya***, Dalam hidup bersama dengan umat yang beragama lain, manusia terlibat dalam hubungan inter relasi demi kepentingan bersama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial karikatif atau kegiatan rekreatif. Dalam dan melalui kegiatan seperti itu seseorang akan saling mengenal dan saling menghargai.

3. ***Dialog Iman***, Dalam dialog iman orang dapat saling memperkaya, walaupun berbeda-beda agama. Sebab ada begitu banyak ajaran agama yang sama, ada begitu banyak visi dan misi agama yang sama. Dan yang jauh lebih penting adalah semua agama ternyata mempunyai perjuangan yang sama dalam menghayati ajaran imannya, dalam hal ini kita dapat saling belajar, saling meneguhkan dan saling memperkaya.

BAB VI

PENUTUP

Ada beberapa kesimpulan dari data lapangan yang penulis temukan berkaitan dengan Aktualisasi Kerukunan dan Konflik Antar Umat Beragama di Kota Bukittinggi.

Pertama, sebagai Kota yang dihuni oleh berbagai etnis, suku bangsa dan agama ditemukan beberapa potensi konflik dan kerukunan di Bukittinggi antara lain:

1. Potensi konflik yang dapat muncul di Kota Bukittinggi adalah: (a) Pemahaman Keagamaan yang Sempit, (b) Terbaikannya sejumlah norma Agama dan Penggunaan simbol agama sebagai kepentingan politik dan ekonomi, (c) Pendirian rumah ibadah.
2. Potensi kerukunan yang dapat tercipta di Kota Bukittinggi adalah: (a) Ajaran Agama yang luhur, (b) Budaya Pluralis, (c) Nasionalisme

Kedua, ditemukan bahwa untuk memangemen konflik pada masyarakat Bukittinggi, Pemerintah Kota membuat beberapa alternatif untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama diantaranya dengan dibentuknya sebuah forum komunikasi yang di berinama Forum Komunkasi Antar Umat Beragama (FKUB) Bukittinggi. Peranan forum ini sangat signifikan bagi kerukunan antar umat beragama di Bukittinggi, karena forum ini didirikan sebagai langkah untuk mengantisipasi

terjadinya konflik agama yang luas di Bukittinggi. Selanjutnya dalam bidang pendidikan Pemerintah Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Diknas Bukittinggi membuat sebuah program Pendidikan Berbasis Aqidah. Program ini dirancang untuk menanamkan aqidah sedini mungkin kepada siswa sehingga siswa tidak hanya ahli dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki akhlak yang baik, sehingga mampu menghindarkan mereka dari kegiatan-kegiatan negatif yang sangat berdampak luas tidak hanya pada remaja itu sendiri tetapi juga pada lingkungan sekitar.

Keberagaman masyarakat Kota Bukittinggi baik dari segi agama, suku, ras dan lain-lain, dapat berdampak pada munculnya gesekan-gesekan yang berpotensi terjadinya konflik. Mengingat dalam masyarakat yang homogen sendiri bisa tercipta konflik sosial, apalagi pada masyarakat yang majemuk. Untuk itu kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian yang serius dari Tokoh Agama, Pemerintah dan Masyarakat.

1. Tokoh Agama

Peran Tokoh Agama sangat signifikan dalam mengarahkan keberagamaan umat. Tokoh agama dituntut memerankan fungsi agama sebagai kemaslahatan manusia. Mereka harus mengembangkan interpretasi (tafsir) yang memiliki semangat perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Pengembangan interpretasi semacam ini akan mampu mencerahkan keberagamaan umat. Sehingga ajaran agama-agama terutama masalah ketuhanan menjadi

fungsional, bahkan mampu menciptakan kedamaian, keadilan, toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

2. Pemerintah

Kondisi objektif masyarakat Bukittinggi yang terdiri berbagai suku, ras dan agama, diharapkan kepada pemerintah setempat untuk pro aktif memberikan kesadaran pada masyarakat umum tentang pentingnya kebersamaan, saling menghargai serta mengakui keberadaan masing-masing kelompok demi terwujudnya pembangunan masyarakat seutuhnya. Tidak ada lagi slogan pribumi dan non pribumi, kelompok Minangkabau, kelompok Jawa, Batak dan sebagainya.

Lebih jauh pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat, bersama-sama membina tradisi dialog antar tokoh dan umat beragama, yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Tradisi ini harus diwujudkan dalam suatu lembaga bersama lintas suku, etnis dan agama.

3. Masyarakat

Fanatisme yang berlebihan dari para penganut agama pada kenyataannya mampu menciptakan konflik sosial. Pada setiap agama terdapat orang-orang yang fanatik berlebihan terhadap ajaran agamanya tak terkecuali masyarakat Bukittinggi. Fanatisme itu hakekatnya baik, tetapi jika sudah

berlebihan, memandang rendah orang lain, disitulah potensi timbulnya gesekan-gesekan pada tingkat masyarakat.

Oleh sebab itu yang perlu diwujudkan pada masyarakat Bukittinggi adalah keberagaman yang benar-benar tulus. Yakni memegang teguh keyakinannya sebagai umat Islam, namun tetap menghargai pemeluk agama lain. Karena perbedaan keyakinan/kemajemukan merupakan suatu keniscayaan dan hendaknya dipahami oleh segenap komponen bangsa, sehingga kemajemukan tadi dapat dielaborasi menjadi sebuah kekuatan pemersatu.

Dengan begitu menyadari pentingnya manusia yang baik merupakan bahagian dari kewajiban menjalankan agama. Ketika seseorang sudah berkeyakinan penuh pada agamanya, maka dengan sendirinya menghargai sesama tanpa memandang perbedaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alqadrie, Ibrahim Syarier (1999). *Konflik di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis* (dalam Antropologi Indonesia, Th, XXIII No 58)
- Arifin, Imran, ed. (1994). *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Kalimasahada Press. Malang.
- Berger, Peter. L. (1991). *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Bruner, M. Edward (1974). *The Expression Ethnicity in Indonesia*. London: Tavistock
- Budiyono, David (1983). *Teori-teori Sosial Modern dari Parsons sampai Herbermas*. Jakarta: Rajawali Press
- Coser. A. Lewis (1974). *Conflict* (dalam International Encyclopedia of The Social Science, V. S, 1974)
- Dahrendrof, Rafl (1986). *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik*: Rajawali Press
- Djatiwijono (1982). *Proyek Kerukunan Umat Beragam.*, Jakarta: Departemen Agama.
- Etek, Azizah dkk (2004). “*Dinamika Pemerintahan Lokal Bukittinggi*” Jakarta: Pemerintah Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)
- Faisal, Sanafiah (1990). *Dasar-dasar dan Aplikasi Penelitian Kualitatif*. Malang: IKIP Malang.
- Fisher, Simon dkk (2001). *Mengeloa Konflik*. Jakarata: Grafika Desa Putra
- Geertz, Clifford (1960). *Agama di Jawa: Konflik dan Integrasi* Robetson: *Agama dalam Analisa Interpretasi Sosiologis*.
- Hendropuspito (1993). *Sosiologi Agama*, Jokjakarta: Konisius
- Hornby, As (1987). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Curren English*. London: Oxford University Press

- Johnson, Dayle Paul (1986). *Teori Sosiologis Klasik dan Modern (Terjemahan)*. Jakarta Gramedia: Erlangga.
- Keesing, M. Reger (1992). *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga
- Kahmat, Dadang (2000). *Sosiologis Agama*. Bandung: Rosdakarya
- Kontowijoyo (2000). *Dimensi Kultural Integrasi Budaya* (dalam Republika 15 Desember 2000)
- Lincoln, Yevona S dan Guba, Egon (1995). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication
- Nasikun (1995). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Nasution, S (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung
- Nazir, M. (1985). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Navis, AA. 1988. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Aksara.
- Mahmudi (2001). *Dialog Malino dan Perdamaian Umat Beragama* (dalam Republika, 26 Desember 2001)
- Margaret M. Polama (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Pals, Daniel L (2001). *Seven Theories of Religion*. Qalam. Yogyakarta
- Pelly, Usman (1999). *Akar Kerusuhan di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi* (dalam Antropologi Indonesia, Th XXIII No 58)
- O’dea F Thomas (1996). *Sosiologi Agama Suatu Pengantar Awal*. Jakarta: Rajawali Press
- Robertson, Ronal (1998). *Agama dalam Interpretasi Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press
- Schrieke B.J.O. (1973). *Pergolakan Agama di Sumatera Barat Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Jakarta: Bahtera.
- Soekanto, Soerjono (1986). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- _____ (1969). *Sosiologi Suatu Pengantar*. UI
- Soemarjan, Selo (2001). *Konflik Antar Suku di Indonesia* (dalam

- Kompas, Kamis 23 Maret 2001.)
- So. Alvin dan Suwarsono (2000). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Sudjangi (2004). *Konflik Sosio-Religius di Maluku Utara dan Solusinya* (dalam Jurnal Harmoni Vol III No 10, April-Juni 2004)
- Sumarni, (2002). Adaptasi Budaya Masyarakat Transmigrasi Asal Jawa dengan Budaya Minangkabau di Kinali
- Saifuddin. AF. (1986). Konflik dan Integrasi. Perbedaan Faham dalam Agama Islam. (Jakarta: Rajawali)
- Vredendregt, J (1984). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Yin, Robert. K. (1996). Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal-Jurnal / Bahan lainnya

- Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius Volume III/No 9, Januari-Maret 2004
- Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius Volume III/No 10, April-Juni 2004
- Bukittinggi dalam Angka 2003